

PERKANTORAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
NO. DAT. KE 0736 / PER-UMP / 09
ANGKAI 15-09-09

**ANALISIS RASIO KEUANGAN PADA APBD PEMERINTAH
KOTA PALEMBANG DALAM MENILAI
KEMANDIRIAN DAN EFEKTIVITAS**

SKRIPSI



OLEH :

Nama : INDAH FEBRIANI
Nim : 22 2005 048

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI
2009**



Usulan Penelitian

**ANALISIS RASIO KEUANGAN PADA APBD PEMERINTAH
KOTA PALEMBANG DALAM MENILAI
KEMANDIRIAN DAN EFEKTIVITAS**

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi



OLEH :

Nama : INDAH FEBRIANI
Nim : 22 2005 048

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI
2009**

Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah
Palembang

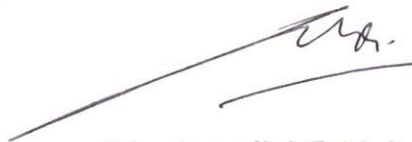
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : ANALISIS RASIO KEUANGAN PADA APBD
PEMERINTAH KOTA PALEMBANG DALAM
MENILAI KEMANDIRIAN DAN EFEKTIFITAS

Nama : Indah Febriani
NIM : 22.2005.048
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik

Diterima dan Disyahkan
Pada tanggal, 27 Agustus 2009

Pembimbing



(Drs. Sunardi, S.E, M.si)

Mengetahui
Dekan
Ketua Jurusan



(Drs. Sunardi, S.E, M.si)

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : INDAH FEBRIANI

NIM : 22.2005.048

Jurusan : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian penjiplakan karya orang lain.

Apabila di kemudian hari terbukti ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palembang, Agustus 2009

Penulis



(INDAH FEBRIANI)

Motto :

- *Be u're self*
- *Lupakan kebaikan yang pernah dilakukan dan Lupakan kesalahan yang orang lain perbuat.*
- *Jenius adalah 1% inspirasi dan 99% keringat. Tidak ada yang dapat menggantikan kerja keras. Keberuntungan adalah sesuatu yang terjadi ketika kesempatan bertemu dengan kesiapan. (Thomas A. Edison)*

(Indah Fb)

Kupersembahkan :

- **Ayah dan Ibu tercinta**
- **Kakak dan Adek tersayang**
- **Bapak Pembimbing**
- **Yang Terkasih**
- **Hijaunya Kampus ku**



PRAKATA

Alhamdulillahirobbil A'lamîn, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “ Analisis Rasio Keuangan Pada APBD Pemerintah Kota Palembang Dalam Menilai Kemandirian dan Efektivitas”.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Allah SWT yang selalu memberi kekuatan dan ketabahan dalam menyusun skripsi, **Ayah dan Ibu** (Syaukani dan Rusmini) dan **Kakak dan Adek** (Andriansyah, A.md dan Dian Maretsyah) yang telah mendidik, membiayai, mendoakan, dan memberikan dorongan serta semangat kepada penulis. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Drs. Sunardi, S.E, M.si yang telah membimbing dan memberikan pengarahan serta saran-saran dengan tulus dan ikhlas dalam menyelesaikan skripsi ini. Selain itu, disampaikan juga terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan, membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.

1. Bapak H. M. Idris, S.E, M.si., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf dan karyawan/karyawati.
2. Bapak H. Drs. Rosyadi, M.M., selaku Dekan Fakultas Ekonomi beserta Pembantu Dekan dan staf karyawan/karyawati Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Bapak Drs. Sunardi, S.E, M.si., selaku Ketua Jurusan Akuntansi dan M.Irfan Tarmizi, S.E, Ak, MBA., selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Hj. Yuhanis Ladewi, S.E, Ak, M.si selaku Pembimbing Akademik.
5. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen yang telah mendidik penulis dalam menuntut ilmu dan memberikan pengetahuan yang bermanfaat.
6. Kantor Pemerintah Kota Palembang yang telah memberikan data dan informasi.
7. Anak kampus Dwi Liadiana, SE, Erdiani, SE, Erfin, SE, Fitrin Metasani, SE, Mardalena, SE, Ramdona, SE, Shintya Oktaviani, S.E, Siska Eka Sari, SE, semangat kita tidak sia-sia.
8. Kawan-kawan aktivis BEM FE-UMP Rahiman, RM. Hery Oktariansyah, Handri Saputra, Yos Sudarso, Andrian Saputra, Yuhelvira, adek-adek HMJ tenkz semangat nya.
9. Kawan-kawan SMK Negeri 1 Palembang Etik Mandala Sari, Irma Oktaviani, Supriani tenkz support kalian.
10. Yang penulis sayangi Arindah makasih atas dukungan moril dan materilnya.

Semoga Allah SWT membalas semua budi baik kalian. Akhirul Kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga amal dan ibadah yang dilakukan mendapat balasan dari-Nya. Amien.

Palembang, Agustus 2009

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN BEBAS PLAGIAT.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO.....	v
HALAMAN PRAKATA.....	vi
HALAMAN DAFTAR ISI.....	viii
HALAMAN DAFTAR TABEL.....	xi
HALAMAN GAMBAR	xii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
HALAMAN ABSTRAK.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Sebelumnya.....	8
B. Landasan Teori.....	9



BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	39
B. Tempat Penelitian.....	40
C. Operasionalisasi Variabel.....	40
D. Data yang diperlukan.....	41
E. Teknik Pengumpulan Data.....	41
F. Analisis Data dan Teknik Analisis.....	43

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	
1. Gambaran Umum Tentang Kota Palembang.....	44
2. Sejarah Singkat Pemerintah Kota Palembang.....	45
3. Struktur Organisasi Pemerintah Kota Palembang.....	48
B. Pembahasan	
1. Pengelolaan PAD Dalam Rangka Meningkatkan Rasio Kemandirian dan Efektivitas.....	53
2. Pengelolaan Dana Perimbangan Dalam Usaha Meningkatkan Rasio Kemandirian.....	61

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan.....	63
B. Saran.....	64

DAFTAR

PUSTAKA..... 65

LAMPIRAN..... 66

DAFTAR TABEL

- I.1. **Data Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Bantuan Pemerintah Pusat/
Provinsi dan Pinjaman Pada APBD Pemerintah Kota Palembang**
- I.2. **Rasio Kemandirian Pada APBD Pemerintah Kota Palembang**
- I.3. **Rasio Efektivitas Pada APBD Pemerintah Kota Palembang**
- III.1. **Operasionalisasi Variabel**
- IV.2. **Perhitungan Rasio Kemandirian Kota Palembang Tahun 2003-2007**
- IV.3. **Perhitungan Rasio Efektivitas Kota Palembang tahun 2003-2007**

DAFTAR GAMBAR

IV.1 Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Palembang

DAFTAR LAMPIRAN

- I. Data Realisasi Penerimaan Daerah Kota Palembang Tahun 2003
- II. Data Realisasi Penerimaan Daerah Kota Palembang Tahun 2004
- III. Data Realisasi Penerimaan Daerah Kota Palembang Tahun 2005
- IV. Data Realisasi Penerimaan Daerah Kota Palembang Tahun 2006
- V. Data Realisasi Penerimaan Daerah Kota Palembang Tahun 2007
- VI. Surat Keterangan Penelitian dari Pemerintah Kota Palembang
- VII. Sertifikat Membaca dan Hafalan Al-quran
- VIII. Kartu Aktivitas Bimbingan Skripsi
- IX. Biodata Penulis

ABSTRAK

Indah Febriani/222005048/Analisis rasio keuangan pada APBD pemerintah kota Palembang dalam menilai kemandirian dan efektivitas/AKUNTANSI.

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan pendapatan asli daerah dalam rangka meningkatkan rasio kemandirian dan efektivitas dan bagaimana pengelolaan dana perimbangan dalam usaha meningkatkan rasio kemandirian. Tujuannya untuk mengetahui pengelolaan PAD dalam rangka meningkatkan rasio kemandirian dan efektivitas dan mengetahui pengelolaan dana perimbangan dalam usaha meningkatkan rasio kemandirian.

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif yaitu penelitian ini untuk mengetahui hubungan antara PAD dan Dana Perimbangan yaitu dalam pengelolaan guna meningkatkan rasio kemandirian dan efektivitas. Data yang digunakan adalah data primer dimana dokumen yang berkaitan dengan keuangan APBD Pemerintah Kota Palembang, teknik pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini adalah wawancara dan dokumentasi. Dan analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dan kuantitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk pengelolaan PAD dapat dilakukan dengan cara : evaluasi sumber-sumber pajak daerah dan retribusi, menjadikan PBB sebagai pajak daerah, memperbaiki system perpajakan daerah, dan optimalisasi peran BUMD dan BUMN. Dan dalam pengelolaan dana perimbangan factor-faktor yang digunakan yaitu : jumlah penduduk, luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi, produk domestic regional bruto perkapita, dan indeks pembangunan manusia.

Kata kunci : Rasio kemandirian dan rasio efektivitas

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keuangan Daerah di era reformasi dan pasca reformasi memiliki ciri yang berbeda. Secara umum, keuangan daerah di era pra reformasi, meskipun telah menyinggung otonomi daerah, masih memberikan wewenang yang terbatas kepada pemerintah daerah sebagai kekuatan eksekutif. Hal ini tercermin dari defenisi PEMDA yang meliputi kepala daerah dan DPRD. Tidak demikian halnya dengan keuangan daerah di era pasca reformasi. Pada era ini wewenang kepada pemerintah daerah telah terlihat secara nyata melalui defenisi PEMDA yang meliputi kepala daerah beserta perangkat daerah lainnya.

Sesuai dengan Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, Pemerintah daerah diberi kewenangan yang luas dalam menyelenggarakan semua urusan pemerintahan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, agama dan kewenangan lain yang ditetapkan peraturan pemerintah. Sebagai konsekuensi dari kewenangan otonomi yang luas, kesejahteraan masyarakat secara demokratis, adil, merata, dan berkesinambungan. Kewajiban itu bisa dipenuhi apabila pemerintah daerah mampu mengelola potensi daerahnya yaitu potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan potensi sumber daya keuangannya secara optimal.



Pemerintah daerah sebagai pihak yang disertai tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan sumber penerimaan dari daerah sendiri perlu terus ditingkatkan agar dapat membantu dalam memikul sebagian beban biaya yang diperlukan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan kegiatan pembangunan yang semakin meningkat, sehingga kemandirian dan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan. PAD juga dapat digunakan sebagai pengukur kemandirian suatu daerah. Kelompok pendapatan asli daerah yang berasal dipisahkan menjadi empat jenis, yaitu: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Bagian Laba usaha Daerah, dan lain-lain PAD.

Berdasarkan UU No.33 tahun 2004, Pemerintah memberikan sumber-sumber pembiayaan yang memadai melalui dana perimbangan, agar daerah mampu melaksanakan kewenangannya secara optimal. Sejalan dengan itu, tahun Pemerintah menerapkan kebijakan tentang dana perimbangan sebagai berikut bahwa dana perimbangan terdiri dari: Pertama, Bagian dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

(BPHTB) dan penerimaan dari sumber daya alam berdasarkan potensi daerah penghasil. Kedua, Dana Alokasi Umum (DAU) yang bertujuan dalam pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan azas desentralisasi dan penetapannya oleh pemerintah. Dan ketiga, memperhatikan teredainya dana dalam APBD, bagian daerah yang menyetorkan dana reboisasi ke pemerintah pusat dapat menganggarkan penerimaan sebesar 40%. Pemerintah tidak lagi menyediakan dana rutin daerah (DRD) dan Dana Pembangunan Daerah (DPD) karena dana-dana dimaksud sudah termasuk dalam DAU. Pengaturan penggunaan DAU sepenuhnya menjadi kewenangan Daerah.

Berikut adalah Data Pendapatan Asli Daerah serta Bantuan Pemerintah Pusat/Propinsi dan Pinjaman (Dana Perimbangan), Dan hasil perhitungan rasio kemandirian Pemerintah Kota Palembang periode 2003-2007.

Tabel. 1.1
Data Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan
Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi dan Pinjaman
Pada APBD Pemerintah Kota Palembang

No.	Tahun	Pandapatan Asli Daerah (PAD)	Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi dan Pinjaman (Dana Perimbangan)
1.	2003	63.522.968.156,65	457.304.356.688,00
2.	2004	61.586.178.324,00	490.729.761.466,00
3.	2005	78.714.175.202,96	591.227.272.622,76
4.	2006	89.676.046.899,37	772.961.769.267,00
5.	2007	120.255.444.816,55	860.375.381.516,00

Sumber Data : APBD Pemkot Palembang Tahun Anggaran 2003 – 2007

Tabel. 1.2
Rasio Kemandirian
Pada APBD Pemerintah Kota Palembang

No.	Tahun	Persentase
1	2003	13,89 %
2	2004	12,55 %
3	2005	13,31 %
4	2006	11,60 %
5	2007	10,60 %

Sumber Data : APBD Pemkot Palembang Tahun Anggaran 2003 – 2007

Data diatas menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Palembang dari tahun 2003-2007 terlihat jelas bahwa rasio kemandirian pada Pemerintah Kota Palembang ini dari tahun ketahun mengalami penurunan, persentase yang didapat sangat rendah sehingga ketergantungan pada pihak eksternal itu meningkat. Persentase rasio kemandirian rendah maka tingkat kesadaran masyarakat akan kewajibannya sangatlah rendah bahkan menurun.

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai minimal 100 persen. Namun demikian tinggi rasio efektivitas, menggambarkan keuangan daerah yang semakin baik. Guna memperoleh ukuran yang baik rasio efektivitas tersebut perlu diperbandingkan dengan rasio efisiensi yang dicapai pemerintah daerah. Berikut adalah hasil perhitungan rasio efektivitas Pemerintah Kota Palembang 2003-2007.

Tabel 1.3
Rasio Efektivitas
Pada APBD Pemerintah Kota Palembang

No.	Tahun	Persentase
1	2003	98,98 %
2	2004	81,71 %
3	2005	77,92 %
4	2006	79,39 %
5	2007	91,42 %

Sumber Data : APBD Pemkot Palembang Tahun Anggaran 2003 – 2007

Data diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2003-2007 rasio efektivitas dibawah 100%, data tersebut menunjukkan bahwa realisasi yang didapat dari pendapatan asli daerah tersebut tidak terpenuhi sehingga kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan tidak efektif.

Dari data rasio kemandirian dan rasio efektivitas dapat dilihat bahwa Pemerintah dan peran serta masyarakat ini masih tergantung pada pihak eksternal dan tidak terpenuhi sehingga kemampuan Pemerintah dalam menjalankan tugas nya tidak efektif. Hal inilah yang mendorong penulis untuk memilih judul skripsi : **“Analisis Rasio Keuangan Pada APBD Pemerintah Kota Palembang Dalam Menilai Kemandirian Dan Efektivitas ”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, yang menjadi masalahnya yaitu:

- a. Bagaimana pengelolaan PAD dalam rangka meningkatkan Rasio Kemandirian dan Efektivitas?
- b. Bagaimana pengelolaan Dana Perimbangan dalam usaha meningkatkan Rasio Kemandirian?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui pengelolaan PAD dalam rangka meningkatkan Rasio Kemandirian dan Efektivitas.
- b. Mengetahui pengelolaan Dana Perimbangan dalam usaha meningkatkan Rasio Kemandirian.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

- a. Bagi Penulis

Penelitian ini dilakukan untuk menerapkan ilmu yang telah didapat dalam perkuliahan serta diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman penulis khususnya dalam bidang audit pada akuntansi sektor publik.

b. Bagi Pemerintah Kota Palembang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan saran bagi Pemerintah Kota Palembang, khususnya memperhatikan masalah-masalah yang berkaitan dengan Bagian Keuangan Kesekretariatan Daerah Kota Palembang.

c. Bagi Almamater

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan informasi yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi penelitian lain yang berkaitan dengan masalah diatas.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya

Penelitian yang terkait dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan Widodo (2001) yang berjudul “Analisis Ratio Keuangan pada APBD Kabupaten Boyolali”. Penelitian tersebut bertujuan untuk menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah, mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah, mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah dan melihat pertumbuhan/perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa kemandirian pemerintah daerah Boyolali dalam memenuhi kebutuhan dana untuk menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat masih relative rendah bahkan cenderung turun. Pendapatan daerah Bayolali sebagian besar masih diprioritaskan untuk mencukupi belanja rutin, yaitu rata-rata mencapai 80% dari total pendapatan yang diterima. Sedangkan pertumbuhan APBD Boyolali pada tahun anggaran 1997/1998-1999/2000 menunjukkan pertumbuhan yang positif meskipun kecenderungan pertumbuhannya semakin berkurang.



B. Landasan Teori

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

a. Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Dalam UU No. 33 tahun 2004 yang dimaksud dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yaitu rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dalam peraturan daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrument kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Sebagai instrument kebijakan, APBD menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan keabilitas dan efektivitas pemerintah daerah. APBD digunakan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran, membantu mengambil keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran dimasa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi para pegawai dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja (Mardiasmo, 2002; 63).

Menurut Baldrick dan Bonni (2001; 315) APBD merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan dari Trilogi Pembangunan yang meliputi pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, dan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

Jadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Suatu rangkaian tahunan pemerintah daerah yang meliputi pemerataan pembangunan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi

dan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Daerah, DPRD, dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

b. Unsur-unsur APBD

Bagian sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun lalu hendaknya diperkirakan secara cermat, sehingga rencana penerimaan menghendaki jumlah yang sebenarnya dari penjumlahan yaitu sisa tunai pada kas daerah, termasuk didalamnya DIPDA-L dan kewajiban kepada pihak ketiga yang belum diselesaikan dan sisa tunai pada pemegang kas dinas.

Unsur-unsur, Anggaran pendapatan dan Belanja daerah yaitu:

1) Pendapatan Daerah

a) Pendapatan asli daerah

Pendapatan asli daerah merupakan sumber utama penerimaan bagi daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan, pinjaman daerah, dan penerimaan lain merupakan sumber pendapatan tambahan untuk mendukung PAD. PAD suatu daerah meliputi: pajak daerah, retribusi daerah, hasil BUMD dan pengelolaan kekayaan daerah, serta pendapatan lain.

b) Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBD yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai

kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan merupakan bagian dari penerimaan pusat yang diserahkan kepada daerah. Dana ini digunakan oleh pemerintah pusat untuk menyeimbangkan hubungan keuangan pusat dan daerah serta hubungan keuangan antar daerah. Unsur-unsur penerimaan dalam dana perimbangan ini adalah:

- (1) Bagi hasil pajak dan bukan pajak
- (2) Dana alokasi umum
- (3) Dana alokasi khusus.

c) Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Sesuai dengan peraturan terbaru, yaitu PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006, pendapatan ini dibagi menurut jenis pendapatan yang mencakup:

- (1) Pendapatan hibah
- (2) Pendapatan dana darurat
- (3) Pendapatan dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota
- (4) Pendapatan dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah
- (5) Pendapatan bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya

2) Belanja Daerah

Belanja daerah disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan, oleh karena itu dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2009 supaya mengutamakan pada pencapaian hasil melalui program dan kegiatan (Belanja Langsung) dari pada Belanja Tidak Langsung).

a) Belanja Tidak Langsung, meliputi:

- (1) Belanja pegawai
- (2) Subsidi dan iuran pemerintah dalam pelenggaraan asuransi kesehatan bagi pegawai negeri sipil dan penerima pensiun dan tarif pelayanan kesehatan bagi peserta PT. Askes (Persero) dan anggota keluarganya di puskesmas dan rumah sakit daerah.
- (3) Penganggaran penghasilan dan penerimaan lain pimpinan dan anggota DPRD serta belanja penunjang kegiatan.
- (4) Belanja kepala daerah dan wakil kepala daerah
- (5) Belanja bunga
- (6) Belanja subsidi
- (7) Belanja hibah
- (8) Belanja bantuan sosial
- (9) Belanja bagi hasil
- (10) Belanja bantuan keuangan
- (11) Belanja tidak terduga
- (12) Belanja operasi dan pemeliharaan

b) Belanja Langsung, meliputi:

- (1) Dalam merencanakan alokasi belanja untuk setiap kegiatan harus dilakukan analisis kewajaran biaya yang dikaitkan dengan output yang dihasilkan dari satu kegiatan. Oleh karena itu menghindari adanya pemborosan, program dan kkegiatan yang direncanakan didasarkan pada kebutuhan riil.
- (2) Terhadap kegiatan pembangunan yang bersifat fisik.
- (3) Belanja pegawai
- (4) Belanja barang dan jasa
- (5) Belanja modal.

3) Pembiayaan

Pembiayaan adalah sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran daerah yang dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran atau sebagai alokasi surplus anggaran.

a) Sumber penerimaan

Sumber pembiayaan berupa penerimaan daerah merupakan sisa lebih anggaran tahun sebelumnya, penerimaan pinjaman dan obligasi, hasil penjualan aset daerah dipisahkan, dan di transfer dari dana cadangan.

b) Sumber pengeluaran daerah

Sumber pembiayaan berupa pengeluaran daerah terdiri atas pembayaran utang pokok yang telah jatuh tempo, penyertaan modal,

transfer ke dana cadangan, dan sia lebih anggaran tahun yang sedang berlangsung.

2. Pendapatan Daerah

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Menurut Halim (2004; 96) Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.

Menurut Baldric dan Bonni (2001; 395) Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber utama penerimaan bagi daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Jadi Pendapatan Asli Daerah merupakan semua sumber utama penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

2) Unsur-unsur PAD

a) Pajak daerah

Pajak daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak. Pada bagian lampiran dapat dilihat bahwa kode rekening untuk provinsi dan kabupaten/kota adalah berbeda. Hal ini terkait dengan pendapatan pajak yang berbeda bagi provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 34



Tahun 2000 tentang Perubahan UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Menurut UU tersebut, jenis pendapatan pajak untuk provinsi meliputi objek pendapatan berikut.

- (1) Pajak kendaraan bermotor
- (2) Bea balik nama kendaraan bermotor
- (3) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
- (4) Pajak kendaraan diatas air
- (5) Pajak air dibawah tanah
- (6) Pajak air dipermukaan.
- (7) Retribusi daerah

Selanjutnya, jenis pajak kabupaten/kota tersusun atas:

- (1) Pajak hotel
- (2) Pajak restoran
- (3) Pajak hiburan
- (4) Pajak reklame
- (5) Pajak penerangan jalan
- (6) Pajak pengambilan bahan galian golongan C
- (7) Pajak parkir.

b) Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi. Pendapatan retribusi juga berbeda untuk provinsi dan

kabupaten/kota, terkait dengan UU Nomor 34 Tahun 2000. Untuk provinsi, jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut :

- (1) Retribusi pelayanan kesehatan
- (2) Retribusi pemakaian kekayaan daerah
- (3) Retribusi penggantian biaya cetak peta
- (4) Retribusi pengujian kapal perikanan

Selanjutnya jenis pendapatan retribusi untuk kabupaten/kota meliputi objek pendapatan berikut:

- (1) Retribusi pelayanan kesehatan
- (2) Retribusi pelayanan kebersihan
- (3) Retribusi pencetakan KTP dan akte catatan sipil
- (4) Retribusi pemakaman
- (5) Retribusi parkir
- (6) Retribusi pasar
- (7) Retribusi air bersih
- (8) Retribusi pengujian kendaraan bermotor
- (9) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
- (10) Retribusi biaya cetak peta dan
- (11) Retribusi pengujian kapal perikanan

c) Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan

kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup :

- (1) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.
- (2) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN.
- (3) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemda. Rekening ini disediakan untuk mengakuntansikan penerimaan daerah selain yang disebut diatas.

Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut:

- (1) Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan
- (2) Jasa giro
- (3) Pendapatan bunga
- (4) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah
- (5) Penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang, dan jasa oleh daerah.
- (6) Penerimaan keuangan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.

- (7) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
- (8) Pendapatan denda pajak
- (9) Pendapatan denda retribusi
- (10) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
- (11) Pendapatan dari pengembalian
- (12) Fasilitas sosial dan umum
- (13) Pendapatan dari penyelenggara pendidikan dan pelatihan
- (14) Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

3) Manajemen Pendapatan Asli Daerah

Sistem pemerintahan yang sentralistik yang dialami bangsa Indonesia selama masa Orde Lama dan Orde Baru memberikan pelajaran kepada kita bahwa pendekatan sentralistik dalam pembangunan telah menimbulkan efek-efek yang negatif. Efek negatif tersebut misalnya desentralisasi telah memasung kreativitas daerah untuk mengembangkan potensi daerah sesuai dengan keinginan masyarakat daerah. Selain itu desentralisasi telah menyebabkan pemerintah daerah semakin kuat tingkat ketergantungannya terhadap pemerintah pusat. Kedua hal tersebut cukup membuat pemerintah dan masyarakat daerah tidak berdaya membangun daerahnya. Besarnya intervensi pemerintah pusat yang dilakukan pada masa lalu telah menimbulkan distorsi. Hal tersebut diperparah dengan masih kuatnya perilaku *rent seeking* dan korupsi

yang akibatnya mengganggu mekanisme pasar. Efek tersebut masih terasa saat ini.

Unsur-unsur manajemen pendapatan asli daerah ada 4 yaitu:

a) Evaluasi sumber-sumber pajak daerah dan retribusi daerah

Masyarakat jangan dibebani dengan pajak baru, sebagaimana telah dikatakan pada bagian awal bahwa saat ini masih ada beberapa pihak yang memiliki kesalah pahaman dan perbedaan persepsi mengenai otonomi daerah. Salah satu pemahaman yang kurang tepat tersebut adalah pemahaman otonomi yang diartikan sebagai "*autonomy*". Mereka beranggapan bahwa otonomi daerah berarti pemerintah daerah harus mencukupi kebutuhan daerahnya dengan pendapatan asli daerah sendiri. Akhirnya pemerintah daerah berusaha meningkatkan pendapatan asli daerah setinggi-tingginya melalui peningkatan pajak dan retribusi daerah serta bagian laba BUMD.

Kebijakan untuk tidak menambah pungutan pajak dan meningkatkan retribusi didasarkan atas beberapa pertimbangan :

- (1) Pungutan retribusi langsung berhubungan dengan masyarakat pengguna layanan publik.
- (2) Investor akan lebih bergairah melakukan investasi di daerah apabila terdapat kemudahan sistem perpajakan di daerah.



b) Menjadikan PBB sebagai pajak daerah

Upaya lain yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD namun tidak membebani masyarakatnya adalah dengan cara menjadikan PBB sebagai pajak daerah.

Perlunya PBB dijadikan sebagai pajak daerah, diantaranya:

- (1) PBB memberikan hasil yang substansial (besar) bagi daerah
- (2) Perolehan hasil dari PBB relatif stabil dan dapat diprediksi
- (3) Pungutan PBB cukup adil (*equitable*), yang memiliki tanah dan bangunan yang bernilai tinggi akan dikenakan pajak yang tinggi pula.
- (4) Pungutan PBB tidak berpengaruh besar terhadap harga-harga sehingga tidak mengganggu efisiensi ekonomi (perekonomian)
- (5) Dasar pengenaan pajak cukup jelas dan mudah dipahami oleh pembayar pajak
- (6) Objek PBB tidak berpindah-pindah (*immovable*), sehingga objek pajak tersebut tidak dapat disembunyikan.
- (7) Pengadministrasiannya relatif mudah; dan
- (8) Jelas pemerintah daerah mana yang berhak menerima pendapatan pajak atas PBB.

Jika PBB dijadikan pajak daerah, maka pemerintah daerah akan mendapatkan pendapatan pajak daerah yang besar sehingga nantinya pemerintah daerah tidak perlu lagi mengurus pajak-pajak yang kecil nilainya dan pemerintah daerah dapat menarik investor

berinvestasi didaerahnya dengan memberikan insentif PBB misalnya berupa pemberian *local tax holiday* kepada investasi baru.

c) Memperbaiki sistem perpajakan daerah

Pada prinsipnya, sistem perpajakan harus ekonomis, efisien, dan adil (*economic, efficiency, dan equity*) serta sederhana dalam pengadministrasiannya.

Beberapa hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memperbaiki sistem perpajakan daerah antara lain:

- (1) Perlunya dilakukan perbaikan administrasi penerimaan daerah (*revenue administration*) untuk menjamin agar semua pendapatan dapat terkumpul dengan baik
- (2) *Checking system*. Pada setiap tahap sangat perlu bahwa catatan-catatan tersebut di *cross-checked*, dilakukan pengecekan menadak (*spot check*) oleh staf senior secara acak.
- (3) Pelaporan hasil pengumpulan pajak dan retribusi daerah perlu dimonitor secara teratur dibandingkan dengan target dan potensi, dan hasilnya dilaporkan kepada staf senior yang memiliki kewenangan mengambil keputusan bila terjadi masalah.

d) Optimalisasi peran BUMD dan BUMN

Pemerintah daerah juga dapat melakukan upaya peningkatan PAD melalui optimalisasi peran BUMD dan BUMN. Peranan investasi swasta dan perusahaan milik negara/daerah diharapkan dapat berfungsi sebagai pemacu utama pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah (*engine of growth* dan sebagai *center of economic activity*). Dari sisi eksternal, daerah dituntut untuk menarik investasi asing agar bersama-sama swasta domestik mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta menimbulkan *multiplier effect* yang besar.

b. Dana Perimbangan

1) Pengertian Dana Perimbangan

Menurut PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari dana penerimaan APBD yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Menurut UU No 33 Tahun 2004 Dana perimbangan merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), selain dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan

sumber pendanaan pemerintah antara pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintah antar-daerah.

Jadi Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari penerimaan APBD yang terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus yang bertujuan untuk membiayai kebutuhan daerah dan mengurangi ketimpangan serta mengurangi kesenjangan sumber pendanaan pemerintah antara pusat dan daerah.

2) Unsur-Unsur Dana Perimbangan

a) Bagi hasil pajak dan bukan pajak

Pemerintah menyerahkan sebagian penerimaan yang diperolehnya baik penerimaan pajak maupun penerimaan bukan pajak. Bagi hasil tersebut meliputi beberapa unsur penerimaan negara, yaitu:

- (1) Penerimaan pertambangan minyak
- (2) Penerimaan pertambangan gas alam
- (3) Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan
- (4) Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- (5) Penerimaan sektor pertambangan umum
- (6) Penerimaan sektor kehutanan
- (7) Penerimaan sektor perikanan

Dana bagi hasil yang bersumber dari pajak yaitu:

- (9) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- (10) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- (11) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

Dana bagi hasil yang bersumber dari sumber daya alam yaitu:

- (1) Kehutanan
- (2) Pertambangan umum
- (3) Perikanan
- (4) Pertambangan minyak bumi
- (5) Pertambangan gas bumi
- (6) Pertambangan panas bumi

b) Dana alokasi umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Daerah-daerah yang ada di Indonesia tidak memiliki kekayaan sumber daya, khususnya alam, yang sama antara satu dengan lainnya. Dengan adanya DAU, daerah yang minus sumber daya alam akan terbantu sebab daerah ini akan menerima subsidi dari daerah yang sumber daya alamnya kaya. Besarnya DAU yang diambil dari APBN untuk daerah adalah 25% dari penerimaan

dalam negeri. Dana ini dialokasikan kepada seluruh provinsi dan kabupaten/kota yang ada di Indonesia dengan provinsi masing-masing 10% dan 90%.

Proporsi DAU antara daerah provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan imbangen kewenangan antara provinsi dan kabupaten kota. Pemerintah merumuskan formula dan perhitungan DAU sebagaimana dimaksud dalam:

- (4) DAU atas dasar celah fiskal untuk daerah provinsi dihitung berdasarkan perkalian bobot daerah provinsi yang bersangkutan dengan jumlah DAU seluruh daerah provinsi
- (5) Bobot daerah provinsi merupakan perbandingan antara celah fiskal daerah provinsi yang bersangkutan dan total celah fiskal seluruh daerah provinsi
- (6) DAU atas dasar celah fiskal untuk suatu daerah kabupaten/kota dihitung berdasarkan perkalian bobot daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dengan jumlah DAU seluruh daerah kabupaten/kota
- (7) Bobot kabupaten/kota merupakan perbandingan antara celah fiskal daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan total celah fiskal seluruh daerah kabupaten/kota.
- (8) Daerah yang memiliki nilai celah fiskal sama dengan nol menerima DAU sebesar alokasi dasar



- (9) Daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatif dan nilai negatif tersebut lebih kecil dari alokasi dasar menerima DAU sebesar alokasi dasar setelah dikurangi nilai celah fiskal
- (10) Daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatif tersebut sama atau lebih besar dari alokasi dasar tidak menerima DAU

Data yang digunakan untuk menghitung kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal diperoleh dari lembaga statistik pemerintah dan/atau lembaga pemerintah yang berwenang menerbitkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga hasil perhitungan DAU per provinsi, kabupaten, dan kota ditetapkan dengan keputusan presiden. Dan penyaluran DAU dilaksanakan setiap bulan masing-masing sebesar $\frac{1}{12}$ (satu perdua belas) dari DAU daerah yang bersangkutan, dan penyaluran DAU dilaksanakan sebelum bulan bersangkutan.

c) Dana alokasi khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

DAK diberikan kepada daerah apabila daerah menghadapi masalah-masalah khusus. Masalah-masalah khusus yang dimaksud adalah:

dikelompokkan dalam jenis pendapatan bantuan dana kontijensi/penyeimbang dari pemerintah dan dana darurat.

Sesuai dengan peraturan terbaru, yaitu PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006, pendapatan ini dibagi menurut jenis pendapatan yang mencakup:

- (1) Pendapatan hibah
- (2) Pendapatan dana darurat
- (3) Pendapatan dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota
- (4) Pendapatan dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah
- (5) Pendapatan bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya

Pemerintah daerah sebagai pihak yang diserahi tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Salah satu alat untuk menganalisa kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan.

3) Manajemen Dana Alokasi Umum

Sumber penerimaan daerah dalam konteks otonomi dan desentralisasi untuk saat ini masih didominasi oleh bantuan dan sumbangan dari pemerintah pusat baik dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan bagi hasil, sedangkan porsi PAD masih relatif kecil. Secara rata-rata nasional, PAD hanya memberi kontribusi 12-25% dari total penerimaan daerah, sedangkan yang \pm 70% masih menggantungkan sumbangan dan bantuan dari pemerintah pusat.

Di kalangan pemerintah daerah sendiri masih terdapat anggapan bahwa terhadap PAD, pemerintah daerah bebas menggunakannya untuk kepentingan daerah, sedangkan Dana Perimbangan penggunaannya perlu menunggu petunjuk dan arahan pusat. Yang harus di pahami adalah bahwa kewenangan yang dimiliki daerah tidak sebatas dalam menggunakan PAD-nya saja, akan tetapi juga kewenangan dalam menggunakan Dana Perimbangan. Dan juga perlu dipahami adalah bahwa otonomi dan desentralisasi tidak berarti tiap daerah harus dapat membiayai seluruh pengeluaran rutin dan modalnya dari Pendapatan Asli Daerah.

Dalam kaitannya manajemen penerimaan daerah, manajemen Dana Perimbangan juga merupakan aspek yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah. Beberapa daerah mengeluhkan bagian DAU yang diterima tidak cukup untuk membiayai pengeluaran daerah.

Idealnya penerimaan daerah yang berasal dari Dana Bagian Daerah atas PPh Perseorangan, PBB, BPHTB, dan penerimaan SDA, serta dari Dana Alokasi Umum sudah cukup untuk membiayai belanja pegawai, sehingga perlu dana bantuan dari pemerintah pusat.

Unsur manajemen alokasi umum yaitu evaluasi formula dana alokasi umum.

4) Perhitungan Dana Perimbangan

Daerah yang memiliki nilai celah fiskal sama dengan nol menerima DAU sebesar alokasi dasar. Kebutuhan fiskal sama dengan kapasitas fiskal.

Contoh perhitungannya :

Kebutuhan Fiskal = Rp 100 miliar

Kapasitas Fiskal = Rp 100 miliar

Alokasi Dasar = Rp 50 miliar

Celah Fiskal = Kebutuhan Fiskal – Kapasitas Fiskal

= Rp 100 miliar – Rp 100 miliar

= 0

DAU = Alokasi Dasar

Total DAU = Rp 50 miliar

Daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatif dan nilai negatif tersebut lebih kecil dari alokasi dasar setelah dikurangi nilai celah

fiskal. Dalam hal celah fiskal negatif maka jumlah DAU yang diterima daerah adalah sebesar alokasi dasar setelah diperhitungkan dengan celah fiskalnya

Contoh perhitungannya:

Kebutuhan Fiskal = Rp 100 miliar

Kapasitas Fiskal = Rp 125 miliar

Alokasi Dasar = Rp 50 miliar

Celah Fiskal = Kebutuhan Fiskal – Kapasitas Fiskal
 = Rp 100 miliar – Rp 125 miliar
 = Rp-25 miliar (negatif).

DAU = Alokasi Dasar + Celah Fiskal

Total DAU = Rp 50 miliar + Rp-25 miliar
 = Rp 25 miliar

Daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatif dan nilai negatif tersebut sama atau lebih besar dari alokasi dasar tidak menerima DAU. Celah Fiskal (negatif) melebihi Alokasi Dasar.

Contoh perhitungannya :

Kebutuhan Fiskal = Rp 100 miliar

Kapasitas Fiskal = Rp 175 miliar

Alokasi Dasar = Rp 50 miliar

Celah Fiskal = Kebutuhan Fiskal – Kapasitas Fiskal
 = Rp 100 miliar – Rp 175 miliar

	= Rp -75 miliar (negatif).
DAU	= Alokasi Dasar + Celah Fiskal
Total DAU	= Rp 50 miliar + Rp -75 miliar
	= Rp -25 miliar atau disesuaikan menjadi Rp 0 (nol)

3. Rasio Keuangan Daerah

a. Pengertian Keuangan pada APBD

Menurut Halim (2004:149) Analisa rasio keuangan adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan tersedia.

Menurut Sofyan (2006:297) Analisis Rasio Keuangan adalah angka yang di peroleh dari hasil perbandingan dari satu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan.

Jadi Analisis Rasio Keuangan adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri laporan keuangan yang tersedia dan diperoleh dari hasil perbandingan dari satu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan.

b. Unsur-unsur Rasio Keuangan Daerah

Hasil analisis rasio keuangan ini selanjutnya digunakan untuk tolok ukur dalam:



- 1) Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah.
- 2) Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah.
- 3) Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatannya.
- 4) Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah.
- 5) Melihat pertumbuhan/perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

Beberapa Rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD antara lain:

1) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan Pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun pinjaman.

$$\text{Rasio kemandirian} = \frac{\text{PAD}}{\text{Bantuan pemerintah pusat/propinsi dan pinjaman}}$$

2) Rasio Efektifitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

Rasio efktivitas menggambarkan kemampuan pemerintah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

$$\text{Rasio efektivitas} = \frac{\text{realisasi penerimaan PAD}}{\text{Target penerimaan PAD yang ditetapkan berdasarkan potensiril daerah}}$$

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100 persen. Namun demikian tinggi rasio efektivitas, menggambarkan keuangan daerah yang semakin baik. Guna memperoleh ukuran yang baik rasio efktivitas tersebut perlu dipersandingkan dengan rasio efisiensi yang dicapai pemerintah daerah. Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja pemerintah daerah melakukan pemungutan pendapatan dilategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari satu atau dibawah 100 persen. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik. Untuk itu pemrintah daerah perlu menghitung secara cermat berapa besarnya biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya sehingga dapat diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatannya tersebut

efisien atau tidak. Hal itu perlu dilakukan karena meskipun pemerintah daerah berhasil merealisasikan penerimaan pendapatan sesuai dengan target yang ditetapkan, namun keberhasilan ini kurang memiliki arti apabila ternyata biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan target penerimaan pendapatannya itu lebih besar daripada realisasi pendapatan diterimannya

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD}}{\text{Realisasi penerimaan PAD}}$$

3) Rasio Aktivitas

Rasio Kekeragaman

Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi presentase dana alokasikan untuk belanja rutin berarti persentase belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil secara sederhana.

Rasio keserasian itu dapat diformulasikan sebagai berikut :

$$\text{Rasio belanja rutin terhadap APBD} = \frac{\text{Total belanja rutin}}{\text{Total APBD}}$$

$$\text{Rasio belanja pembangunan terhadap APBD} = \frac{\text{Total belanja pembangunan}}{\text{Total APBD}}$$

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Widodo di Kabupaten Boyolali mengatakan bahwa belum ada patokan yang pasti berapa besarnya rasio belanja rutin maupun pembangunan terhadap APBD yang ideal, karena sangat dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan. Namun demikian, sebagai daerah di Negara berkembang peranan pemerintah daerah untuk memacu pelaksanaan pembangunan masih relative besar. Oleh karena itu, rasio belanja pembangunan yang relatif masih kecil perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah.

4) *Debt Service Coverarage Ratio (DSCR)*

Dalam rangka melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana di daerah selain menggunakan pendapatan asli daerah, pemerintah daerah dapat menggunakan alternative sumber dana lain yaitu dengan melakukan pinjaman, sepanjang prosedur dan pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku .

Persyaratan pinjaman daerah menurut Undang-undang RI no.33 Tahun 2004 pasal 54 tentang pinjaman daerah adalah :

- a) Jumlah sisa pinjaman daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya

- b) Rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman ditetapkan oleh pemerintah
- c) Tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang berasal dari pemerintah

Penjelasan Undang-undang RI no.33 tahun 2004 pasal 54 pada point b menjelaskan bahwa DSCR adalah perbandingan antara jumlah PAD, Dana Bagi hasil dan DAU setelah dikurangi belanja wajib dibagi dengan penjumlahan angsuran pokok, bunga dan biaya lain yang jatuh tempo. Yang dimaksud belanja wajib adalah belanja pengawai dan anggota DPRD.

$$DSCR = \frac{\{PAD + BD + DAU\} - BelanjaWajib}{Pokok Pinjaman + Biaya Lain}$$

Keterangan :

DSCR : *Debt Service Coveraga Ratio*

PAD : Pendapatan Asli daerah

BD : Bagian daerah dari PBB, bea perolehan Hak atas tanah dan bangunan & penerimaan sumber daya alam, serta bagian daerah lain-lain dari pajak penghasilan perseorangan

DAU : Dana Alokasi Umum

BW : Belanja Wajib

P : Angsuran pokok pinjaman yang jatuh tempo pada tahun anggaran.

BL : Biaya lainnya

Ketentuan yang menyangkut kegunaan pinjaman daerah menurut Undang-undang RI no.33 tahun 2004 pasal 53 adalah :

- a) Pinjaman Jangka Pendek dipergunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas.
- b) Pinjaman Jangka menengah dipergunakan hanya untuk membiayai penyediaan layanan umum yang tidak menghasilkan penerimaan.
- c) Pinjaman Jangka Panjang dipergunakan untuk membiayai proyek investasi yang menghasilkan penerimaan.
- d) Pinjaman Jangka menengah dan Jangka panjang wajib mendapatkan persetujuan DPRD.

5) Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan (*growth ratio*) seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran dapat digunakan mengevaluasi potensi-potensi yang perlu mendapat perhatian.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian menurut Sugiono (2004:11) ditinjau dari eksplansinya ada 3 macam, yaitu:

1. Penelitian Deskriptif

Yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain.

2. Penelitian Komparatif

Yaitu suatu penelitian yang bersifat membandingkan, disini variabelnya masih sama dengan penelitian variabel mandiri tetapi untuk yang lebih dari satu atau dalam waktu yang berbeda

3. Penelitian Asosiatif

Yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antar dua variabel atau lebih.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Deskriptif. Dimana data yang dipelajari adalah data yang diambil dari Pemerintah Kota Palembang sehingga ditemukan variabel mandiri.



B. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Kota Palembang yaitu Kantor Walikota Palembang pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Palembang di Jalan Merdeka No.1 Rt.1 Rw.1 Kelurahan 22 Ilir Palembang.

C. Operasional Variabel

Operasionalisasi variabel yang digunakan dalam penelitian ini akan dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel. III.1
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Definisi	Indikator
1. Rasio Kemandirian keuangan daerah	Adalah kemampuan suatu pemerintahan dalam membiayai sendiri kegiatan-kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.	a. Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (1) Evaluasi sumber-sumber pajak daerah retribusi daerah (2) Menjadikan PBB sebagai pajak daerah (3) Memperbaiki system perpajakan daerah (4) Optimalisasi peran BUMD dan BUMN
2. Rasio Efektivitas keuangan daerah	Adalah rasio yang menggambarkan kemampuan pemerintah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang telah direncanakan dan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi riil suatu daerah diperlukan oleh pemerintah daerah.	b. Pengelolaan Dana Perimbangan (1) Evaluasi formula DAU

Sumber : Penulis, 2009

D. Data Yang Diperlukan

Menurut Indriantoro dan Bambang Supomo (2002: 146) data terdiri dari:

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh dari sumber asli (tidak melalui perantara).

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh penulis dari Pemerintah Kota Palembang yaitu Data Primer dimana dokumen yang berkaitan dengan Keuangan APBD Pemerintah Kota Palembang.

E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Husein Umar (2002:92-94), teknik pengumpulan data terdiri dari :

1. Angket (Kuesioner)

Angket (Kuesioner) adalah suatu cara pengumpulan data dengan menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden, dengan harapan mereka akan memberikan respons terhadap pertanyaan tersebut.

2. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data. Pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan muka dengan orang yang diwawancarai.

3. Observasi

Observasi adalah teknik yang menuntut adanya pengamatan dari si periset terhadap obyek risetnya, misalnya dalam melakukan eksperimen.

4. Tes

Tes adalah salah satu cara mengumpulkan data yang sifatnya mengevaluasi hasil proses untuk mendapatkan kondisi awal sebelum proses (*pre-test dan post-test*).

5. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu yang lalu.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara, dimana penulis komunikasi langsung dengan pegawai Kantor walikota Palembang.
2. Dokumentasi, dimana penulis memfotocopy APBD tersebut dan mencatatnya.

F. Analisis Data dan Teknik Analisis

Menurut M.Iqbal Hasan (2002:32-33) menyatakan bahwa ada dua cara metode analisis yaitu:

1. Analisis Kualitatif

Adalah analisis data dimana data-datanya tidak dinyatakan dalam bentuk angka-angka.

2. Analisis Kuantitatif

Adalah metode analisis data dimana data-datanya dinyatakan dalam bentuk angka-angka.

Dalam penelitian penulis menggunakan metode yaitu:

- a. Analisis Kualitatif** dimana data-data nya dalam bentuk bukan angka yaitu tentang APBD Pemerintah Kota Palembang.
- b. Analisis Kuantitatif** dimana data-data nya dalam bentuk angka seperti APBD Pemerintah Kota Palembang.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Gambaran Umum Tentang Kota Palembang

a. Sejarah Singkat Kota Palembang

Kota Palembang didirikan pada tahun 605 Shaka (atau 683 Masehi) oleh Dapunta Iyang. Kelahiran dan perkembangan Kota Palembang pada dasarnya sejalan dengan lahir dan berkembangnya Kerajaan Sriwijaya.

Pada masa Kerajaan Sriwijaya nama Palembang belum dikenal, tetapi lokasi pusat Kerajaan Sriwijaya adalah bertempat dengan letak Kota Palembang sekarang. Setelah runtuhnya Kerajaan Sriwijaya barulah nama Palembang dikenal dengan “ Palimpong “, sebagai mana tersebut dalam tulisan Cina Chufanshi. Selain itu juga dapat dilihat dari tulisan Wanglayuan yang berjudul Toaichilio (tahun 1349/1350) yang juga menyebutkan “ Palimpong “ untuk Kota Palembang. Dilihat dari sejarah.

b. Letak Geografis

Secara Geografis Kota Palembang terletak pada $104^{\circ}37''$ - $104^{\circ}52''$ Bujur Timur dan $2^{\circ}52''$ - $3^{\circ}53''$ Lintang Selatan dengan ketinggian rata-rata 12 meter diatas permukaan laut. Luas wilayah Kota Palembang adalah 400,61 km² atau 40.061 Ha. Batas wilayah Kota Palembang sebelah

Timur dan Utara berbatasan dengan Kabupaten Banyu Asin, Sebelah Selatan dan Barat Berbatasan dengan Ogan Ilir dan Kabupaten Muara Enim.

c. Wilayah Administrasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 23 Tahun 2000 yang telah diundangkan pada tanggal 11 Desember 2000 dalam Lembar Daerah Kota Palembang Tahun 2000 Nomor 24, Kecamatan dalam Kota Palembang mengalami pemekaran dari 8 Kecamatan menjadi 14 Kecamatan serta 103 Kelurahan.

2. Sejarah Singkat Pemerintah Kota Palembang

Tempat dimana hingga saat ini dijalankannya aktivitas administrasi pemerintah daerah kota Palembang, tidak lepas dari sejarah perjuangan kota Palembang. Jepang yang semakin terdesak dalam perang dunia ke II di Pasifik memberikan janji yang muluk-muluk kepada bangsa Indonesia, yaitu : “ Janji Kemerdekaan Indonesia“. Pada tanggal 10 Agustus 1945, Siaran 1945, Siaran Radio Tokyo menyatakan kesediaan Jepang untuk menyerah tanpa syarat dan ternyata kapitulasi di tandatangani tanggal 14 Agustus 1945. Berita kapitulasi itu hanya diketahui pejabat penting saja.

Berita proklamasi kemerdekaan Indonesia dapat didengar di Palembang untuk pertama kalinya oleh Pemuda Mailan yang pada waktu itu menjadi radio operator dari Palembang Sinbun (Cabang Kantor Berita



Domei yang kini LKBN “ ANTARA “). Berita proklamasi itu diteruskan oleh Mailan kepada Dr. A. K. Gani sebagai tokoh Nasional terkemuka di Sumatera Selatan pada tanggal 18 Agustus 1945.

Pada tanggal 24 Agustus 1945, anggota PPKI, Dr. M. Amir dan Mr. Teuku M. Hasan datang ke Palembang membawa *copy* dari teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. *Copy* tersebut diterima pukul 24.00 WWS dan pada malam itu juga yaitu, dini hari, tanggal 25 Agustus 1945 lalu setelah itu diadakan rapat guna menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam rangka mengatur pemerintahan di Sumatera Selatan. Kekuatan BPKR beserta unsur-unsur dinamik lainnya bersatu dan bergerak merebut kekuasaan dari tangan pemerintah Jepang yang masih menempati kantor *Water-Leiding*. Bendera Merah Putih dinaikkan, untuk seterusnya dikibarkan diatas menara kantor *Water-Leiding* tersebut untuk menggantikan bendera Jepang Hinomaru (Matahari Terbit). Empat bendera untuk empat sudut menara *Water-Leiding* dipasang oleh mantan opsir Gyu Gun bekerjasama dengan pemuda-pemuda yang dipimpin Mailan, Abi Hasan Said dan Budjang Yakob.

Kantor *Water-Leiding* yang menjadi ajang perebutan heroik pada tanggal 25 Agustus 1945 itu kemudian dijadikan kantor Residen Palembang, dan selanjutnya dijadikan Kantor Walikota Palembang sampai saat ini yang sekaligus sebagai Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Palembang.

Kantor Walikota yang dahulu lebih dikenal dengan sebutan Kantor Woter-Leiding atau Menara Air ini, terletak di jalan Merdeka No. 1 RT. 1 RW. 01 Kelurahan 22 Ilir Kecamatan Ilir Barat I Palembang, Sumatera Bagian Selatan.

Pada awalnya Palembang menjadi Kotapraja, kemudian menjadi Kotamadya dan sekarang menjadi Pemerintahan Kota.

Berikut ini adalah sejarah kepemimpinan Kota Palembang :

1. Ir. R. CA. F. J. Nesse van Lissa (1919 - 1925)
2. J. Le. Ceeq de Armand d'Ville (1925 - 1932)
3. F. H. van Wetering (1932 - 1939)
4. P. H. M. Hilde Brand (1939 - 1942)
5. Ir. Ibrahim Zahir (1942 - 1945)
6. Raden Hanan (1945 - 1947)
7. Y. De Bont (1947 - 1948)
8. W. van Doop (1948 - 1950)
9. Bang Salim (1950) Pajabat Negara RI
10. Mr. R. Sudarman Ganda Brata (1950 - 1954)
11. RA. Abusamah (1954) Pejabat Sementara
12. H. M Ali Amin, SH (1955 - 1960)
13. Mgs. H. A. Rachman (1960 - 1962)
14. AKBP. H. Abdullah (1962 - 1968)
15. H. M. Rasyad Nawawi (1968 - 1970)
16. R. H. A. Arifal Tjek Yan (1970 - 1973)

- | | |
|----------------------------|-------------------|
| 17. Drs. H. A. Dachlan H.y | (1973 - 1978) |
| 18. H. Chom Aziz, SH | (1978 - 1983) |
| 19. Drs. H. Husni | (1983 - 2003) |
| 20. Ir. Eddy Santana Putra | (2003 – 2008) |
| 21. Ir. Eddy Santana Putra | (2008 – Sekarang) |

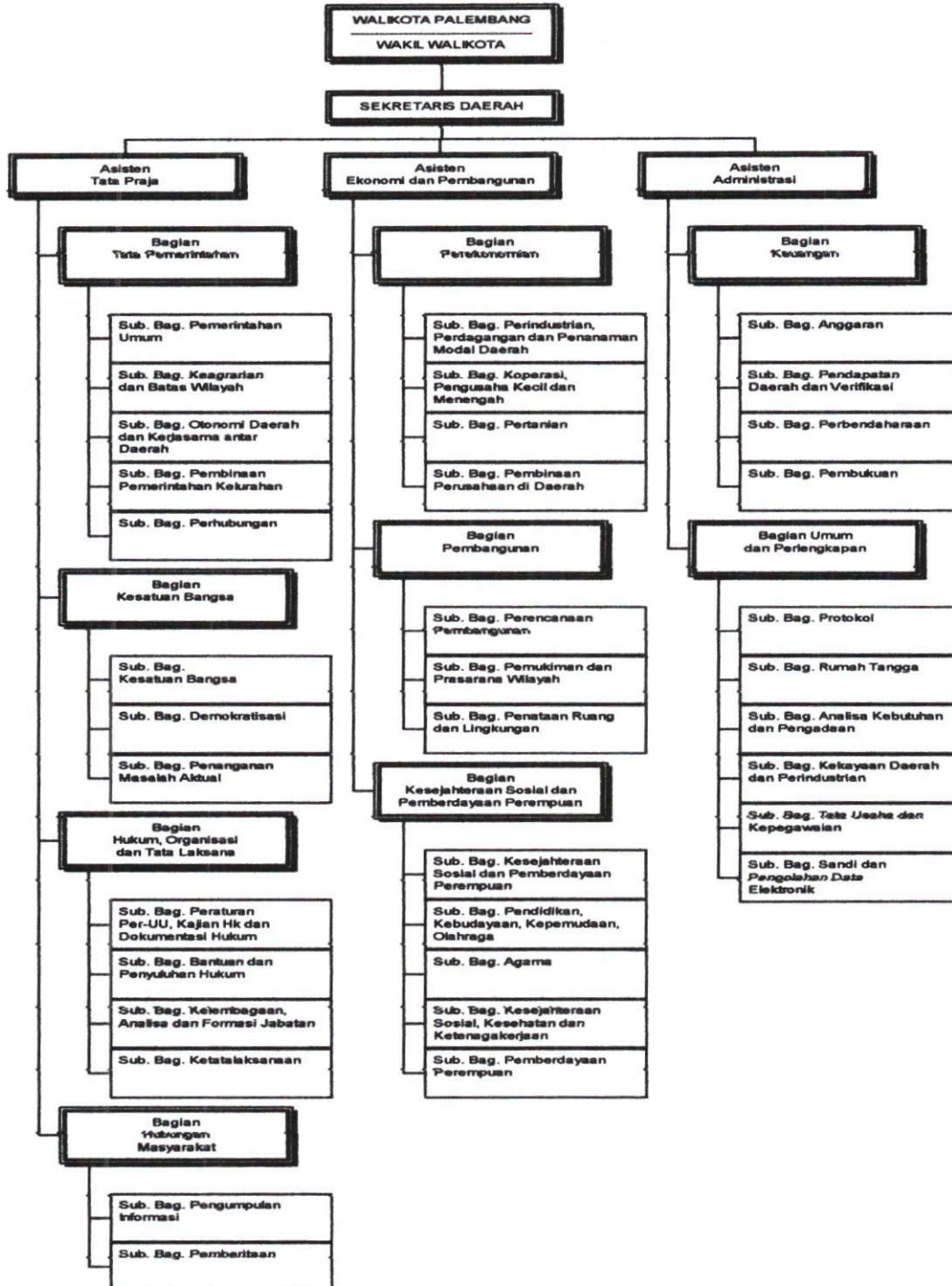
3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi menunjukkan wewenang dan tanggung jawab secara formal dalam setiap fungsi organisasi. Struktur organisasi melukiskan interaksi kegiatan, peranan, hubungan, tujuan dan sifat-sifat organisasi lainnya, tetapi diingat pula bahwa peranan struktur pada setiap jenis organisasi ternyata berlainan dalam tingkat dan kualitasnya. Suatu struktur organisasi menunjukkan tugas dan wewenang atau tanggung jawab dari masing-masing pegawai agar tidak saling tumpang tindih.

Secara umum struktur organisasi yang digunakan dalam organisasi pemerintah adalah struktur organisasi garis atau lini yang merupakan tipe organisasi tertua dan paling sederhana. Pada struktur organisasi ini wewenang puncak pimpinan mengatur bagian-bagian yang dibawahnya secara langsung, sehingga dapat memudahkan tujuan organisasi Struktur Pemerintah Kota Palembang dapat dilihat pada gambar IV.1 berikut ini :

Gambar IV.1 Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Palembang

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PEMERINTAH KOTA PALEMBANG



Sumber : Pemerintah Kota Palembang 2009

a. Unit-unit kerja

Uraian tugas per struktur dari Sekretariat Daerah Kota Palembang dapat dilihat sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Walikota Palembang BAB III Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah tahun 2002, yang dijabarkan sebagai berikut:

1) Kepala Daerah

Kepala Daerah memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.

2) Wakil Kepala Daerah

Wakil Kepala Daerah mempunyai tugas membantu walikota dalam melaksanakan tugas, wewenang dan fungsinya dan mengkoordinasi kegiatan instansi Pemerintahan di daerah serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

3) Sekretaris daerah

Sekretaris Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah.

4) Asisten Tata Praja

Sekretaris Tata Praja mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, komunikasi, perumusan peraturan perundang-undangan dan kesatuan bangsa. Dan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh:

- a) Bagian Tata Pemerintahan.
 - b) Bagian Hukum, Organisasi dan Tatalaksana.
 - c) Bagian Hubungan Masyarakat.
 - d) Bagian Kesatuan Bangsa.
- 5) Asisten Ekonomi dan Pembangunan
- Asisten Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis koordinasi pembinaan pelaksanaan pembangunan, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pemberdayaan perempuan. Dan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh:
- a) Bagian Perekonomian.
 - b) Bagian Pembangunan.
 - c) Bagian Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Perempuan.
- 6) Asisten Administrasi
- Asisten Administrasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis koordinasi pembinaan keuangan, protokol, perlengkapan, tata usaha, kepegawaian dan rumah tangga. Dan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh:
- a) Bagian Keuangan.
 - b) Bagian Umum dan Perlengkapan.

4. Data Realisasi Penerimaan Daerah Kota Palembang

Data realisasi penerimaan daerah kota Palembang tahun 2003-2007 (dapat dilihat dilampiran).

B. PEMBAHASAN

Berdasarkan data yang diperoleh penulis sehubungan dengan Analisis Rasio Keuangan pada APBD Pemerintah Kota Palembang Dalam Menilai Kemandirian dan Efektitas, maka terlebih dahulu penulis menjelaskan mengenai Rasio kemandirian dan efektivitas. Dimana Rasio Kemandirian yaitu menunjukkan kemampuan pemda dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun pinjaman. Sedangkan Rasio efektivitas yaitu rasio yang menggambarkan kemampuan pemda dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

Seperti yang telah diketahui pada Bab II telah menjelaskan, bahwa pendapatan asli daerah adalah semua sumber utama penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dan dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari penerimaan APBD yang terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus yang bertujuan untuk membiayai kebutuhan daerah dan mengurangi ketimpangan

serta mengurangi kesenjangan sumber pendanaan pemerintah antara pusat dan daerah.

1. Pengelolaan pendapatan asli daerah dalam rangka meningkatkan Rasio Kemandirian dan Efektivitas.
 - a. Perhitungan Rasio Kemandirian Kota Palembang

Tabel IV.2
Perhitungan Rasio Kemandirian Kota Palembang
Tahun 2003-2007
(dalam rupiah)

Keterangan	Tahun				
	2003	2004	2005	2006	2007
PAD	63.522.968.156,65	61.586.178.324	78.714.175.202,96	89.676.046.899,37	120.255.444.816,55
Bantuan Pemerintah Pusat/provinsi dan pinjaman	457.304.356.688	490.729.761.466	591.227.272.622,76	772.951.769.267	860.375.381.516
Rasio Kemandirian	13,89 %	12,55 %	13,31 %	11,60 %	13,98 %

Sumber : Pemerintah Kota Palembang Tahun 2003-2007

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa rasio kemandirian kota Palembang dari tahun ke tahun tidak mengalami peningkatan yang optimal karena dapat dilihat dari persentase tahun 2003-2007 menunjukkan persentase yang berfluktuasi. Sehingga kemandirian pemerintah kota Palembang masih rendah.



b. Perhitungan Rasio Efektivitas Kota Palembang

Tabel IV.3
Perhitungan Rasio Efektivitas Kota Palembang
Tahun 2003-2007
(dalam Rupiah)

Keterangan	Tahun				
	2003	2004	2005	2006	2007
Realisasi PAD	63.522.968.156,65	61.586.178.324	78.714.175.202,96	89.676.046.899,37	120.255.444.816,55
Target Penerimaan PAD	64.173.268.700	75.367.171.982	101.021.534.300	112.947.828.304	131.548.084.692,20
Rasio Efektivitas	98,98 %	81,71 %	77,92 %	79,39 %	91,42 %

Sumber : Pemerintah Kota Palembang Tahun 2003-2007

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pemerintah kota Palembang dalam rasio efektivitas itu tidak efektif. Dikatakan efektif jika kemampuan daerah dalam menjalankan tugas rasio yang dicapai mencapai minimal 100%. Semakin tinggi rasio efektivitas maka kemampuan daerah pun semakin semakin baik.

Melihat Rasio Kemandirian dan Rasio Efektivitas kota Palembang, maka dalam rangka mengelola pendapatan asli daerah maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1) Evaluasi sumber-sumber pajak daerah dan retribusi

Evaluasi sumber-sumber pajak daerah dan retribusi menurut pegawai kantor dinas pendapatan daerah ada 2 cara yang dilakukan dalam pelaksanaannya yaitu :

a) Diadakannya Rapat Koordinasi (RAKOR)

Diadakannya rapat koordinasi ini dimaksudkan untuk semua bagian-bagian baik di bidang pajak maupun retribusi ini semua

permasalahannya di bahas pada rapat koordinasi ini. Dimana pada rapat ini yang menghadiri yaitu Walikota Palembang, Asisten I, Asisten III, inspektorat, Kepala dinas, serta camat se-Kota Palembang yang dilakukan di ruang rapat Dispenda. Para pengelola baik dari pajak maupun retribusi itu sendiri yang akan membahas permasalahan yang ada.

Adapun inti dari rapat koordinasi itu sendiri yaitu :

- a) Dapat mengetahui realisasi yang dicapai terhadap target yang di tetapkan.
- b) Dapat diketahui pos-pos penerimaan retribusi dan pajak di sejumlah dinas juga bervariasi, ada yang melampaui target, ada juga yang tidak.
- c) Dibuatnya surat dan dilayangkan ke dinas-dinas terhadap menanggapi belum terpenuhinya target penerimaan di setiap dinas yang berwenang melakukan penarikan retribusi.

Adapun retribusi yang telah dievaluasi dari tahun 2003-2007 adalah sebagai berikut:

(1) Retribusi Pembinaan Perhubungan Udara dan telekomunikasi

Evaluasi pada retribusi pembinaan perhubungan udara dan telekomunikasi mengalami peningkatan pada tahun 2006 walau pada tahun 2007 mengalami penurunan karena pada tahun 2003, 2004, dan 2005 retribusi ini sangatlah tidak baik dilihat dari presentasinya. Setelah dievaluasi pada tahun 2005 mengalami peningkatan setelah dievaluasi sehingga retribusi pembinaan perhubungan dengan tahun berikutnya.

(2) Retribusi Beca

Evaluasi pada retribusi beca dari tahun 2004 sangatlah baik dilihat dari presentasinya akan tetapi tahun 2005 dan 2006 retribusi tersebut sangatlah tidak dapat di pertahankan dikarenakan setiap tahunnya mengalami penurunan sehingga setelah dievaluasi pada tahun 2007 retribusi tersebut di hilangkan dalam rangka terciptanya Palembang yang bersih, aman, rapi, dan indah.

(3) Retribusi Penyedotan Tinja

Evaluasi pada retribusi penyedotan kakus tahun 2004 mengalami kenaikan dalam presentasinya tapi pada tahun 2005, 2006, dan 2007 mengalami penurunan tahun nya sehingga setelah dievaluasi retribusi ini walau menurun realisasinya masih ada pendapatannya karena pendapatannya masih bisa di evaluasi untuk meningkat tahun berikutnya.

b) Diadakannya Supervisi Mendadak (SIDAK)

Diadakannya supervisi mendadak oleh pejabat setempat yang berwenang dibidangnya, supervisi mendadak ini dilakukan agar apapun yang terjadi dilapangan terlihat jika ada yang melakukan penyalahgunaan terhadap pekerjaan dan jabatan. Dan dapat melihat secara langsung objek pajak yang bersangkutan terhadap pajak yang tersebut.

Adapun tempat dilakukannya sidak antara lain :

(1) Pasar

Sidak dilakukan di pasar dengan mengetahui keadaan pasar yang semestinya, dimana seperti kondisi pasar yang sudah layak dengan fasilitas dan kondisi yang telah diberikan oleh pemerintah yang mana pada dasarnya dana tersebut berasal dari pajak itu sendiri. Dengan kondisi dan fasilitas yang diberikan apakah akan memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang merasakan dan bagi penjual yang menempati. Dengan adanya fasilitas yang ada apakah telah memberikan kenyamanan bagi masyarakat dan penjual dan apakah juga fasilitas dan kondisi tersebut telah pelihara oleh pihak-pihak bersangkutan.

(2) Restoran

Sidak yang dilakukan di restoran adalah sidak mengenai pendapatan restoran itu sendiri, jika restoran tersebut menerima pendapatan yang tinggi maka pajak yang dikenakan pun tinggi tapi jika pendapatan yang diterima rendah maka pajak yang dikenakan pun akan rendah. Maka dari itu pihak dari instansi pajak restoran melakukan sidak pada restoran agar kegiatan dan kondisi restoran dapat terlihat secara langsung. Jika kondisi tiap harinya restoran tersebut banyak pengunjung secara otomatis pendapatan akan tinggi tapi jika sebaliknya juga dapat diketahui.

2) Menjadikan PBB sebagai Pajak Daerah

Menjadikan PBB sebagai pajak daerah itu sangatlah baik, dengan alasan:

- a) Pungutan PBB cukup adil, yang memiliki tanah dan bangunan yang bernilai tinggi akan dikenakan pajak yang tinggi pula. Dengan lebar dan luas nya suatu bangunan maka semakin besar pula pajak yang dikenakan sehingga keadilan pada pungutan PBB tersebut cukup adil. Jika tanah dan bangunan yang dimiliki oleh wajib pajak tidak besar dan mewah maka pajak yang dikenakan pun tidak akan besar dan sebaliknya jika WP memiliki tanah dan bangunan yang luas dan mewah maka pajak yang dikenakan pun cukup besar.
- b) Pungutan PBB tidak berpengaruh besar terhadap harga-harga sehingga tidak mengganggu efisiensi ekonomi. Dengan tingginya PBB yang dikenakan oleh pemerintah karena kondisi pemerintahan itu tidak berpengaruh terhadap harga-harga maksudnya jika pajak yang dikenakan tinggi itu tidak mengganggu jalannya perekonomian seperti harga pasar, harga transportasi, harga konsumsi, dan biaya lainnya.
- c) Objek pajak bumi dan bangunan tidak berpindah-pindah sehingga objek pajak tersebut tidak bisa di sembunyikan. Objek pajak PBB adalah tempat, bumi dan bangunan dimana lokasinya tidak mungkin bisa pindah apalagi sampai disembunyikan.

Pemerintah sudah memikirkan untuk menjadikan PBB sebagai pajak daerah akan tetapi pemerintah tidak bisa menjadikan PBB sebagai pajak daerah itu dikarenakan pemerintah daerah itu sendiri memiliki peraturan yang mana pada peraturan tersebut PBB bukan termasuk pada pajak daerah sehingga sampai sekarang PBB tersebut tidak termasuk pada pajak daerah.

3) Memperbaiki system perpajakan daerah

Memperbaiki system perpajakan dengan mensurvei apakah pajak tiap tahunnya mengalami penurunan dalam realisasinya, jika mengalami penurunan tiap tahun nya maka pemerintah melakukan tindakan dengan mengecek tiap pajak dan retribusi yang bersangkutan sehingga dapat ditemukan faktor yang menyebabkan menurun pajak tersebut. Dalam memperbaiki system perpajakan daerah hal yang sama seperti evaluasi terhadap pajak tersebut dapat juga dilakukan.

Adapun beberapa cara yang digunakan pemerintah untuk memperbaiki system perpajakan daerahnya antara lain:

- a) Perbaikan revisi peraturan daerah pajak daerah
- b) Perbaikan revisi peraturan daerah retribusi daerah
- c) Sosialisasi kepada masyarakat
- d) Penyederhanaan dalam pengadministrasian

4) Optimalisasi peran BUMD & BUMN

Pemerintah kota Palembang dalam BUMD sebagai badan usaha yang di beri kemandirian pengelolaan keuangan dapat berfungsi sebagai penyumbang penerimaan daerah baik dalam bentuk pajak, deviven maupun dari hasil privatisasi. Peran BUMD selain penyumbang penerimaan daerah juga sebagai pelaksana pelayanan publik dan penyeimbang kekuatan pasar. Dalam rangka optimalisasi pendapatan BUMD Kota Palembang.

Optimalisasi bagi laba usaha daerah Palembang :

a) Bank Pembangunan Daerah (Bank Sumsel)

Pada tahun 2003 Bank sumsel memberikan laba usaha yang sudah optimal dapat dilihat dari persentase nya yaitu 107,74% tapi pada tahun 2004 Bank sumsel tidak dapat memberikan laba usaha yang optimal malah sama sekali tidak memberikan labanya. Dan pada tahun 2005 dan 2006 Bank sumsel telah memberikan labanya sebesar 82,08% dan 82,14% laba yang cukup mendekati optimal. Dan pada tahun 2007 Bank pembangunan daerah tersebut memberikan laba usaha yang optimal.

b) PDAM Tirta Musi

PDAM Tirta Musi memberikan laba usaha bagi daerah dimulai dari tahun 2005 sebesar 100% angka yang optimal bagi daerah kota Palembang tapi pada tahun 2006 PDAM Tirta Musi tidak memberikan laba usahanya karena ingin melakukan pembangunan di semua titik

daerah agar dapat menggunakan air bersih disetiap sudut daerahnya. Dan pada tahun 2007 PDAM Tirta Musi memberikan laba usaha sebesar 100% angka yang optimal bagi perusahaan daerah yang baru berkembang dibidang Penyediaan Air Minum.

2. Pengelolaan dana perimbangan dalam usaha meningkatkan rasio kemandirian

Faktor-faktor yang mempengaruhi perhitungan dana perimbangan:

a. Jumlah penduduk

Jumlah penduduk merupakan variabel yang mencerminkan kebutuhan akan penyediaan layanan publik disetiap daerah. Sehingga apabila jumlah penduduk mengalami pemadatan maka perhitungan akan mempengaruhi dana perimbangan sehingga. Jika jumlah penduduk semakin meningkat maka layanan publik akan lebih dioptimalkan karena kebutuhan yang semakin besar untuk layanan publik tersebut.

b. Luas wilayah

Luas wilayah merupakan variabel yang mencerminkan kebutuhan atas penyediaan sarana dan prasarana per satuan wilayah. Semakin luas wilayah maka semakin banyak yang dibutuhkan untuk sarana dan prasarana sehingga pada perhitungan akan mengalami perubahan dan peningkatan.

c. Indeks kemahalan konstruksi

Indeks kemahalan konstruksi merupakan cerminan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik

secara relatif antar-daerah. Dengan mahalnya harga prasarana fisik mampu mempengaruhi perhitungan dana perimbangan yang semestinya.

d. Produk domestik regional bruto per kapita

Produk domestik regional bruto merupakan cerminan potensi dan aktivitas perekonomian suatu daerah yang dihitung berdasarkan total seluruh output produksi kotor dalam suatu wilayah.

e. Indeks pembangunan manusia

Indeks pembangunan manusia merupakan variabel yang mencerminkan tingkat pencapaian kesejahteraan penduduk atas layanan dasar dibidang pendidikan dan kesehatan. Dengan tingkat pembangunan manusia maka pada bidang pendidikan dan kesehatan dapat mempengaruhi dengan memaksimalkan pembangunan tersebut dalam pencapaian kesejahteraan penduduk sehingga dapat mengoptimalkan dana perimbangan.

Apabila jumlah penduduk, luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi, produk domestik regional bruto perkapita, dan indeks pembangunan manusia diperhatikan dengan benar, maka Rasio Kemandirian Kota Palembang akan naik/meningkat.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan dan uraian dari hasil penelitian yang dilakukan pada kantor Pemerintah Kota Palembang dalam pengelolaan PAD dan Dana Perimbangan guna meningkatkan Rasio kemandirian dan efektivitas, yang dalam hal itu pengelolaan-pengelolaan yang dilakukan adalah :

1. Pengelolaan PAD dalam rangka meningkatkan rasio kemandirian dan efektivitas dapat dilakukan dengan cara :
 - a. Evaluasi sumber-sumber pajak daerah dan retribusi yang telah dilakukan.
 - 1) Diadakannya Rapat Koordinasi (RAKOR)
 - 2) Diadakannya Supervisi Mendadak (SIDAK)
 - b. Menjadikan PBB sebagai pajak daerah, guna menambah PAD tiap tahunnya, belum dilaksanakan karena masih termasuk pajak pusat.
 - c. Memperbaiki system perpajakan daerah, guna menambah PAD dilakukan melalui revisi peraturan daerah (Perda).
 - d. Optimalisasi peran BUMD dan dapat memberikan sumbangan ke PAD
2. Pengelolaan Dana Perimbangan dalam rangka meningkatkan rasio kemandirian

Pengelolaan yang dilakukan pada dana perimbangan dalam usaha meningkatkan rasio kemandirian ada beberapa faktor yang mempengaruhi perhitungan dana perimbangan yaitu :



- a. Jumlah penduduk yang mencerminkan kebutuhan akan penyediaan layanan public disetiap daerah.
- b. Luas wilayah yang mencerminkan kebutuhan atau penyediaan sarana dan prasarana persatuan wilayah
- c. Indeks permasalahan konstruksi cerminan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga persatuan titik secara relatif antar daerah.
- d. Produk domestik regional bruto perkapita cerminan potensi dan aktivitas perekonomian suatu daerah.
- e. Indeks pembangunan manusia mencerminkan tingkat pencapaian kesejahteraan penduduk atau layanan dasar dibidang pendidikan dan kesehatan.

B. Saran

Berdasarkan simpulan diatas maka penulis memberikan saran :

1. Mengusahakan agar PBB dapat menjadi pajak daerah
2. Pengelolaan PD. Pasar Palembang Jaya agar dikelola dengan professional agar dapat memberikan kontribusi kepada PAD.
3. Melakukan update/pembaharuan data yang berhubungan dengan perhitungan dana perimbangan khususnya Dana Alokasi Umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2007. **Akuntansi Keuangan Daerah**, Penerbit Salemba 4, Jakarta.
- Baldric Siregar dan Bonni Siregar. 2001. **Akuntansi Pemerintahan dengan Sistem Dana**, Edisi ketiga, Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, Yogyakarta.
- Husien Umar. 2002. **Metode Riset Bisnis**, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Anggota IKAPI, Jakarta.
- Mardiasmo. 2002. **Akuntansi Sektor Publik**, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2002. **Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah**, Penerbit Andi, Percetakan Offset, Yogyakarta.
- M. Iqbal Hasan. 2002. **Statistik I (Statistik Deskriptif)**, Edisi Kedua, Bumi Aksara, Jakarta.
- Nur Indriantoro dan Bambang Supomo. 2004. **Metode Penelitian Bisnis**, BPFE UI.
- Undang-Undang Otonomi Daerah**, Penerbit Cemerlang, Jakarta.
- Sofyan Syafri Harahap. 2006. **Teori Akuntansi**, Penerbit PT. Grafindo Persada, Jakarta.
- Sugiyono. 2004. **Metode Penelitian Bisnis**, Cetakan 7, Penerbit CV. Alfabetha Bandung.

NO.	KODE REKENING	JENIS PENERIMAAN	TARGET	REALISASI - PENERIMAAN		%	S/D BULAN INI	%	KET.
				S/D BULAN LALU	BULAN INI				
		I PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							
		I.1 PAJAK DAERAH							
1	1.20.05.00.004.1.1.01	PAJAK HOTEL	5.400.000.000,00	4.311.364.123,00	642.937.851,00	11,91	4.954.301.974,00	91,75	Dipenda
2	1.20.05.00.004.1.1.02	PAJAK RESTORAN	9.700.000.000,00	9.849.583.904,00	913.176.570,00	9,41	10.762.760.474,00	110,96	Dipenda
3	1.20.05.00.004.1.1.03	PAJAK HIBURAN	2.400.000.000,00	2.419.876.787,00	205.120.310,00	8,55	2.624.997.097,00	109,37	Dipenda
4	1.20.05.00.004.1.1.04	PAJAK REKLAME	4.050.000.000,00	3.563.461.075,73	557.582.551,00	13,77	4.121.043.626,73	101,75	Dipenda
5	1.20.05.00.004.1.1.05	PAJAK PENERANGAN JALAN	28.060.000.000,00	24.530.135.557,33	2.366.591.796,00	8,45	26.896.727.353,33	96,06	Dipenda
6	1.20.05.00.004.1.1.06	PAJAK PENGOLOHAN BAHAN GALIAN GOL. C	600.000.000,00	474.406.267,00	258.297.865,00	43,05	732.704.132,00	122,12	Dipenda
7	1.20.05.00.004.1.1.07	PAJAK PARKIR	1.325.000.000,00	1.283.218.440,00	111.114.510,00	8,39	1.394.332.950,00	105,23	Dipenda
		JUMLAH PENERIMAAN I 1 :	51.475.000.000,00	46.432.046.154,06	5.054.821.453,00	9,82	51.486.867.607,06	100,02	
		I.2 RETRIBUSI DAERAH							
	1.01.01.00.00.4.1.2.02.01	RET. PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH (GED/AULA)	150.000.000,00	110.960.000,00	3.000.000,00	1,88	113.960.000,00	71,23	Diknas
	1.02.01.00.00.4.1.2.01.01	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN	4.007.686.272,00	3.591.196.382,00	396.390.137,00	9,85	3.987.586.519,00	99,50	Kesehatan
3	1.02.01.00.00.4.1.2.03.09	RETRIBUSI IZIN PRAKTEK KESEHATAN	55.150.000,00	69.750.000,00	5.750.000,00	8,83	75.500.000,00	115,89	Kesehatan
4	1.02.01.00.00.4.1.2.03.10	RETRIBUSI IZIN LAIK SEHAT	68.200.000,00	68.280.000,00	-	-	68.280.000,00	154,48	Kesehatan
5	1.02.02.00.00.4.1.2.01.01	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN RSUD BARI	6.823.523.800,00	6.016.261.525,00	1.141.171.000,00	16,72	7.157.432.525,00	104,89	RSUD BARI
6	1.03.01.00.00.4.1.2.02.14	RETRIBUSI SEWA LABORATORIUM	150.000.000,00	122.750.000,00	27.250.000,00	18,17	150.000.000,00	100,00	PU
7	1.03.01.00.00.4.1.2.03.06	RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (IUIJK)	175.000.000,00	170.889.000,00	4.450.000,00	2,54	175.339.000,00	100,19	PU
8	1.03.01.00.00.4.1.2.03.07	RETRIBUSI IZIN PENIMBUNAN RAWA	250.000.000,00	63.093.000,00	68.594.000,00	27,44	131.687.000,00	52,67	PU
9	1.03.06.00.00.4.1.2.03.11	RET. IZIN GALIAN (PAM, LISTRIK, TELKOM, PIPA GAS)	100.000.000,00	-	-	-	-	-	Penerangan Jalan
10	1.04.02.00.00.4.1.2.01.08	RET. PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN	325.000.000,00	308.505.290,00	17.505.500,00	5,39	326.010.790,00	100,31	PBK
11	1.05.01.00.00.4.1.2.01.09	RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA	200.000.000,00	97.855.000,00	4.755.000,00	2,38	102.610.000,00	51,31	Tata Kota

			S/D BULAN LALU	BULAN INI					
1	01.00.00.4.1.2.03.01	RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN	18.000.000.000,00	14.769.295.650,00	1.195.610.000,00	6,64	15.864.915.650,00	88,69	Tata Kota
2	05.01.00.00.4.1.2.03.16	RETRIBUSI IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH	250.000.000,00	115.471.600,00	-	-	115.471.600,00	46,19	Tata Kota
3	1.05.01.00.00.4.1.2.03.19	RETRIBUSI PEMBINAAN & PENYELENGGARAAN REKLAME	2.750.000.000,00	2.337.159.529,00	165.444.900,00	6,02	2.502.604.429,00	91,00	Tata Kota
15	1.07.01.00.00.4.1.2.01.05	RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM	3.250.000.000,00	1.709.701.700,00	142.366.300,00	4,38	1.852.068.000,00	56,99	Dishub
16	1.07.01.00.00.4.1.2.01.07	RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	2.750.000.000,00	2.533.229.020,00	218.514.240,00	7,95	2.751.743.260,00	100,06	Dishub
17	1.07.01.00.00.4.1.2.02.04	RETRIBUSI TERMINAL	2.000.000.000,00	1.093.840.050,00	120.850.800,00	6,04	1.214.690.850,00	60,73	Dishub
18	1.07.01.00.00.4.1.2.02.09	RETRIBUSI PEMBINAAN P. UDARA DAN POSTEL	450.000.000,00	340.844.000,00	33.524.000,00	7,45	374.368.000,00	83,19	Dishub
19	1.07.01.00.00.4.1.2.02.11	RETRIBUSI JASA ANGKUTAN SUNGAI & PENYEBERANGAN (ASDP)	800.000.000,00	589.343.544,00	46.074.500,00	5,76	635.418.044,00	79,43	Dishub
20	1.07.01.00.00.4.1.2.03.04	RETRIBUSI IZIN TRAYEK	1.400.000.000,00	1.397.090.000,00	122.185.000,00	8,73	1.519.275.000,00	108,52	Dishub
21	1.08.02.00.00.4.1.2.02.12	RETRIBUSI PENGELOLAAN LIMBAH CAIR	587.157.455,00	435.537.254,00	77.777.716,00	13,25	513.314.970,00	87,42	Bapedalda
22	1.08.02.00.00.4.1.2.02.14	RETRIBUSI JASA LABORATORIUM	33.848.000,00	88.638.000,00	8.637.000,00	25,52	97.275.000,00	287,39	Bapedalda
23	1.08.02.00.00.4.1.2.03.08	RET.KEGIATAN YG WJB DILENGKAPI KAJIAN LINGKUNGAN	4.825.000,00	2.200.000,00	-	-	2.200.000,00	45,60	Bapedalda
24	1.08.04.00.00.4.1.2.01.02	RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN	3.000.000.000,00	1.722.430.000,00	203.590.000,00	6,79	1.926.020.000,00	64,20	DKP
25	1.08.04.00.00.4.1.2.01.04	RET. PELAYANAN PEMAKAMAN & PENGABUAN MAYAT	225.000.000,00	112.050.000,00	5.550.000,00	2,47	117.600.000,00	52,27	DKP
26	1.08.04.00.00.4.1.2.02.07	RET. PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS	200.000.000,00	45.405.500,00	12.850.000,00	6,43	58.255.500,00	29,13	DKP
27	1.10.01.00.00.4.1.2.01.03	RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA KTP DAN AKTE CATATAN SIPIL	279.247.250,00	257.730.100,00	19.094.100,00	6,84	276.624.200,00	99,13	Capil
28	1.13.01.00.00.4.1.2.02.10	RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA	62.000.000,00	24.550.000,00	2.375.000,00	3,83	26.925.000,00	43,43	Kessos
29	1.13.01.00.00.4.1.2.02.15	RETRIBUSI PANGKAS RAMBUT DAN SALON	12.000.000,00	12.760.000,00	-	-	12.760.000,00	106,33	Kessos
30	1.14.01.00.00.4.1.2.01.20	RET. PEMBINAAN & PENGAWASAN NORMA KESELAMATAN KERJA	250.000.000,00	181.303.685,00	1.059.800,00	0,42	182.363.485,00	72,95	Disnaker
31	1.14.01.00.00.4.1.2.01.21	RET. PEMBINAAN PERUSAHAAN & KETENAGAKERJAAN	75.000.000,00	31.780.000,00	325.000,00	0,43	32.105.000,00	42,81	Disnaker
32	1.16.01.00.00.4.1.2.03.03	RETRIBUSI IZIN GANGGUAN/KERAMAIAAN	2.250.000.000,00	2.347.041.573,00	99.835.500,00	4,44	2.446.877.073,00	108,75	PMD
33	1.20.11.00.00.4.1.2.01.03	RET. PENGGANTIAN BY KTP & KK	146.399.100,00	223.339.700,00	14.190.200,00	9,69	237.529.900,00	162,25	IT II
34	1.20.11.00.00.4.1.2.01.11	RETRIBUSI JASA UMUM LAINNYA (LEGES)	17.850.000,00	13.850.000,00	550.000,00	3,08	14.400.000,00	80,67	IT II
35	1.20.12.00.00.4.1.2.01.03	RET. PENGGANTIAN BY KTP & KK	64.324.800,00	39.427.250,00	58.060.250,00	90,26	97.487.500,00	151,56	SU II
36	1.20.12.00.00.4.1.2.01.11	RETRIBUSI JASA UMUM LAINNYA (LEGES)	6.000.000,00	3.810.000,00	-	-	3.810.000,00	63,50	SU II



			S/D BULAN LALU	BULAN INI					
	1.20.13.00.00.4.1.2.01.03	RET. PENGGANTIAN BY KTP & KK	70.800.000,00	92.790.650,00	6.878.100,00	9,71	99.668.750,00	140,78	SU I
	1.20.13.00.00.4.1.2.01.11	RETRIBUSI JASA UMUM LAINNYA (LEGES)	13.800.000,00	7.610.000,00	250.000,00	1,81	7.860.000,00	56,96	SU I
	1.20.14.00.00.4.1.2.01.03	RET. PENGGANTIAN BY KTP & KK	33.500.000,00	18.226.300,00	28.458.450,00	84,95	46.684.750,00	139,36	Kertapati
40	1.20.14.00.00.4.1.2.01.11	RETRIBUSI JASA UMUM LAINNYA (LEGES)	16.500.000,00	4.137.000,00	200.000,00	1,21	4.337.000,00	26,28	Kertapati
41	1.20.15.00.00.4.1.2.01.03	RET. PENGGANTIAN BY KTP & KK	40.260.000,00	29.447.450,00	7.743.100,00	19,23	37.190.550,00	92,38	Gandus
42	1.20.15.00.00.4.1.2.01.11	RETRIBUSI JASA UMUM LAINNYA (LEGES)	9.250.000,00	8.046.000,00	-	-	8.046.000,00	86,98	Gandus
43	1.20.16.00.00.4.1.2.01.03	RET. PENGGANTIAN BY KTP & KK	65.000.000,00	72.128.300,00	-	-	72.128.300,00	110,97	Iilir Barat II
44	1.20.16.00.00.4.1.2.01.11	RETRIBUSI JASA UMUM LAINNYA (LEGES)	10.000.000,00	4.135.000,00	50.000,00	0,50	4.185.000,00	41,85	Iilir Barat II
45	1.20.17.00.00.4.1.2.01.03	RET. PENGGANTIAN BY KTP & KK	135.050.500,00	130.061.400,00	-	-	130.061.400,00	96,31	Iilir Barat I
46	1.20.17.00.00.4.1.2.01.11	RETRIBUSI JASA UMUM LAINNYA (LEGES)	12.000.000,00	11.389.000,00	-	-	11.389.000,00	94,91	Iilir Barat I
47	1.20.18.00.00.4.1.2.01.03	RET. PENGGANTIAN BY KTP & KK	82.102.450,00	76.498.850,00	-	-	76.498.850,00	93,17	Plaju
48	1.20.18.00.00.4.1.2.01.11	RETRIBUSI JASA UMUM LAINNYA (LEGES)	8.713.000,00	5.667.000,00	-	-	5.667.000,00	65,04	Plaju
49	1.20.19.00.00.4.1.2.01.03	RET. PENGGANTIAN BY KTP & KK	61.560.000,00	63.055.150,00	4.003.000,00	6,50	67.058.150,00	108,93	IT I
50	1.20.19.00.00.4.1.2.01.11	RETRIBUSI JASA UMUM LAINNYA (LEGES)	9.500.000,00	4.745.000,00	200.000,00	2,11	4.945.000,00	52,05	IT I
51	1.20.20.00.00.4.1.2.01.03	RET. PENGGANTIAN BY KTP & KK	116.361.000,00	123.693.000,00	7.119.550,00	6,17	132.812.550,00	114,14	Kalidoni
52	1.20.20.00.00.4.1.2.01.11	RETRIBUSI JASA UMUM LAINNYA (LEGES)	9.975.000,00	6.300.000,00	850.000,00	3,52	7.150.000,00	71,68	Kalidoni
	1.20.21.00.00.4.1.2.02.01	RETRIBUSI JASA USAHA	3.000.000,00	1.900.000,00	700.000,00	8,75	2.600.000,00	32,50	Kalidoni
54	1.20.21.00.00.4.1.2.01.03	RET. PENGGANTIAN BY KTP & KK	58.800.000,00	43.790.550,00	15.276.800,00	25,98	59.067.350,00	100,45	Bukit Kecil
55	1.20.21.00.00.4.1.2.01.11	RETRIBUSI JASA UMUM LAINNYA (LEGES)	2.250.000,00	3.220.000,00	15.000,00	0,67	3.235.000,00	143,78	Bukit Kecil
56	1.20.22.00.00.4.1.2.01.03	RET. PENGGANTIAN BY KTP & KK	62.397.700,00	219.939.350,00	21.433.550,00	34,35	241.372.900,00	386,83	Sukarami
57	1.20.22.00.00.4.1.2.01.11	RETRIBUSI JASA UMUM LAINNYA (LEGES)	18.500.000,00	15.000.000,00	2.875.000,00	15,54	17.875.000,00	96,62	Sukarami
58	1.20.23.00.00.4.1.2.01.03	RET. PENGGANTIAN BY KTP & KK	73.198.400,00	57.566.150,00	54.521.000,00	74,48	112.087.150,00	153,13	Kemuning
59	1.20.23.00.00.4.1.2.01.11	RETRIBUSI JASA UMUM LAINNYA (LEGES)	10.000.000,00	6.225.000,00	200.000,00	2,00	6.425.000,00	64,25	Kemuning
60	1.20.24.00.00.4.1.2.01.03	RET. PENGGANTIAN BY KTP & KK	153.880.500,00	96.794.000,00	8.179.200,00	5,31	104.973.200,00	68,21	Sako
61	1.20.24.00.00.4.1.2.01.11	RETRIBUSI JASA UMUM LAINNYA (LEGES)	12.280.000,00	9.560.000,00	590.000,00	4,80	10.150.000,00	82,65	Sako
62	1.20.24.00.00.4.1.2.02.01	RETRIBUSI JASA USAHA (RETRIBUSI GEDUNG)	20.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	50,00	20.000.000,00	100,00	Sako

			REVENUE	EXPENSE	BULAN				
	1.00.00.4.1.2.02.03	RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN	159.225.000,00	125.957.876,00	31.051.362,00	19,52	157.039.238,00	98,63	Pertanian
	1.01.00.00.4.1.2.02.08	RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN (RPH)	409.565.000,00	260.085.000,00	19.480.000,00	4,76	279.565.000,00	68,26	Pertanian
	2.01.01.00.00.4.1.2.02.15	RETRIBUSI USAHA KEHUTANAN	99.835.000,00	38.100.050,00	-	-	38.100.050,00	38,16	Pertanian
	2.01.01.00.00.4.1.2.02.16	RETRIBUSI SARANG BURUNG WALET	346.125.000,00	161.355.600,00	6.848.000,00	1,98	168.203.600,00	48,60	Pertanian
67	2.04.01.00.00.4.1.2.01.05	RETRIBUSI PEMBINA USAHA KEPARIWISATAAN	552.150.000,00	470.168.135,00	38.380.000,00	6,95	508.548.135,00	92,10	Pariwisata
68	2.06.01.00.00.4.1.2.03.18	RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI	50.000.000,00	40.468.000,00	750.000,00	1,50	41.218.000,00	82,44	Perdagangan
69	2.06.01.00.00.4.1.2.03.19	RETRIBUSI IZIN USAHA PERDAGANGAN	1.097.300.000,00	330.750.000,00	21.100.000,00	1,92	351.850.000,00	32,07	Perdagangan
70	2.06.01.00.00.4.1.2.03.20	RETRIBUSI TANDA DAFTAR PERUSAHAAN	806.950.000,00	342.427.500,00	27.699.000,00	3,43	370.126.500,00	45,87	Perdagangan
71	2.06.01.00.00.4.1.2.03.21	RETRIBUSI PENYIMPANAN & ATAU PENYALURAN BHN MIGAS DAN NON MIGAS	200.000.000,00	99.341.500,00	-	-	99.341.500,00	49,67	Perdagangan
		JUMLAH PENERIMAAN I.2 :	55.999.049.227,00	44.039.947.163,00	4.532.211.055,00	8,09	48.572.158.218,00	86,74	
		I.3 HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN							
I.3.1	1.20.03.00.00.4.1.3.01 :	BAGIAN LABA ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH / BUMD :							
	1.20.03.00.00.4.1.3.01.01	BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMSEL	1.250.000.000,00	-	1.366.826.719,28	109,35	1.366.826.719,28	109,35	
2	1.20.03.00.00.4.1.3.01.02	PDAM TIRTA MUSI	1.000.000.000,00	-	1.000.000.000,00	100,00	1.000.000.000,00	100,00	
3	1.20.03.00.00.4.1.3.01.03	PD. PASAR PALEMBANG JAYA	500.000.000,00	-	-	-	-	-	
		JUMLAH PENERIMAAN I.3 :	2.750.000.000,00	-	2.366.826.719,28	86,07	2.366.826.719,28	86,07	
		I.4 LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SYAH							
1	1.20.03.00.00.4.1.4.01	HASIL PENJUALAN ASET DAERAH YANG TIDAK DIPISAHKAN :							
	1.20.03.00.00.4.1.4.01.19	PENJUALAN ASET DAERAH LAINNYA	785.186.465,20	136.522.300,00	46.550.000,00	5,93	183.072.900,00	23,32	
2	1.20.03.00.00.4.1.4.02	PENERIMAAN JASA GIRO :							
	1.20.03.00.00.4.1.4.02.01	JASA GIRO KAS DAERAH	8.000.000.000,00	7.689.115.619,92	202.811.434,00	2,54	7.891.927.053,92	98,65	

Opinion Visor: BUMD & BUMN

				12 BULAN LALU	BULAN INI		
	1.00.00.4.1.4.03	PENERIMAAN BUNGA DEPOSITO :					
	1.03.00.00.4.1.4.03.01	PEN.REK. DEPOSITO PD BANK PEMBANGUNAN DAERAH	3.200.000.000,00	1.935.625.050,00	157.053.330,00	4,91	2.092.708.380,00
4	1.20.03.00.00.4.1.4.04	TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH (TGR) :					
	1.20.03.00.00.4.1.4.04.01	KERUGIAN UANG DAERAH	75.000.000,00	33.972.795,00	3.675.835,00	5,17	37.645.630,00
5	1.20.03.00.00.4.1.4.10						
	1.20.03.00.00.4.1.4.01	PENDAPATAN DARI PENGEMBALIAN PPh 21	1.764.849.000,00	-	382.725.000,00	21,69	382.725.000,00
6	1.20.03.00.00.4.1.4.14	PENERIMAAN LAIN-LAIN :					
	1.20.03.00.00.4.1.4.14.03	PENERIMAAN LAIN-LAIN	7.500.000.000,00	22.438.084.767,21	6.676.100.029,00	89,01	29.114.164.796,21
		JUMLAH PENERIMAAN I.4 :	21.325.035.465,20	32.233.321.132,13	7.469.145.628,00	35,03	39.702.466.760,13
I		JUMLAH PENERIMAAN PAD :	131.549.084.692,20	122.705.314.449,19	19.423.004.855,28	14,76	142.128.319.304,47
		II					
	1.20.03.00.00.4.2.1	II.1 BAGI HASIL PAJAK/BUKAN PAJAK					
II * 1 :		BAGI HASIL PAJAK :					
1	1.20.05.00.00.4.2.1.01.01	BAGI HASIL DARI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)	41.192.064.000,00	47.245.177.483,00	5.558.359.727,00	13,49	52.803.537.210,00
2	1.20.05.00.00.4.2.1.01.02	BAGI HASIL DARI BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	13.952.000.000,00	15.620.690.608,00	807.655.293,00	5,70	16.428.545.901,00
3	1.20.03.00.00.4.2.1.01.03	BAGI HASIL DARI PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI (TERMASUK PPh PASAL 21, 25, DAN 29)	34.479.415.795,00	20.687.649.477,00	16.219.239.261,00	47,04	36.906.668.758,00
4	1.20.03.00.00.4.2.1.01.04	BAGI HASIL PBB BAG. PEMERINTAH PUSAT YANG DIKEMBALIKAN KE KABUPATEN / KOTA	3.148.875.073,00	-	6.086.508.737,00	193,29	6.086.508.737,00

			S/D BULAN LALU	BULAN INI			
	1.03.00.00.4.2.1.01.05	BAGI HASIL BPHTB BAGIAN PEMERINTAH PUSAT YANG DIKEMBALIKAN	2.455.535.308,00	-	32.103.284,00	1,31	32.103.284,00 1,31
6	1.20.03.00.00.4.2.1.01.06	PENERIMAAN BIAYA PEMUNGUTAN PBB	6.000.000.000,00	-	2.857.897.303,00	47,63	2.857.897.303,00 47,63
		JUMLAH PENERIMAAN II.1.1 :	101.227.890.176,00	83.553.517.568,00	31.561.963.625,00	31,18	115.115.481.193,00 113,72
II.1 2 :		BAGI HASIL BUKAN PAJAK/SUMBER DAYA ALAM :					
1	1.20.03.00.00.4.2.1.02.02	BAGI HASIL DARI PROVISI SUMBER DAYA HUTAN (PSDH)	229.899.500,00	60.936.105,00	77.431.364,00	33,68	138.367.469,00 60,19
2	1.20.03.00.00.4.2.1.02.04	BAGI HASIL DARI IURAN TETAP / LANDRENT	150.000.000,00	-	-	-	-
3	1.20.03.00.00.4.2.1.02.06	BAGI HASIL DARI PENERIMAAN PUNGUTAN PENGUSAHAAN PERIKANAN	1.272.727.270,00	149.898.967,00	37.538.164,00	2,95	187.437.131,00 14,73
4	1.20.03.00.00.4.2.1.02.08	BAGI HASIL DARI PENERIMAAN SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI	24.774.144.000,00	15.931.618.727,00	10.590.928.130,00	42,75	26.522.546.857,00 107,06
5	1.20.05.00.00.4.2.1.02.09	BAGI HASIL DARI PENERIMAAN SEKTOR PERTAMBANGAN GAS ALAM	39.189.719.000,00	26.980.450.203,00	11.728.256.899,00	29,93	38.708.707.202,00 98,77
	1.20.03.00.00.4.2.1.02.11	BAGI HASIL DARI PENERIMAAN SEKTOR PERTAMBAHAN UMUM	2.774.769.231,00	3.276.233.630,00	1.537.250.045,00	55,40	4.813.483.675,00 173,47
		JUMLAH PENERIMAAN II.1.2 :	68.391.259.001,00	46.399.137.732,00	23.971.404.602,00	35,05	70.370.542.334,00 102,89
		JUMLAH PENERIMAAN II.1 : (Bagi Hasil Pajak + bagi Hasil Bukan Pajak)	169.619.149.177,00	129.952.655.300,00	55.533.368.227,00	32,74	185.486.023.527,00 109,35
	1.20.03.00.00.4.2.2.01.03	II.2 DANA ALOKASI UMUM (DAU)	659.611.000.000,00	659.611.000.000,00	54.968.500.000,00	8,33	714.579.500.000,00 108,33
		JUMLAH PENERIMAAN II.2 :	659.611.000.000,00	659.611.000.000,00	54.968.500.000,00	8,33	714.579.500.000,00 108,33
	1.20.03.00.00.4.2.3.01.03	II.3 DANA ALOKASI KHUSUS :	8.387.000.000,00	7.602.419.819,00	5.801.200.000,00	69,17	13.403.619.819,00 159,81
		JUMLAH PENERIMAAN II.3	8.387.000.000,00	7.602.419.819,00	5.801.200.000,00	69,17	13.403.619.819,00 159,81

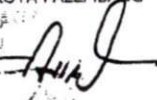
		III	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SYAH :						
	1.20.03.00.00.4.3.3	III.1	DANA BAGI HASIL PJK DARI PROPINSI & PEMERINTAH DAERAH LAINNYA :						
	1.20.03.00.00.4.3.3.01		DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROPINSI :						
1	1.20.03.00.00.4.3.3.01.01		DANA BAGI HASIL DARI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	23.191.065.798,95	11.595.532.898,00	14.163.046.419,00	51,07	25.758.579.317,00	111,07
2	1.20.03.00.00.4.3.3.01.02		DANA BAGI HSL DARI PAJAK KENDARAAN DI ATAS AIR	16.028.016,18	8.014.008,00	8.014.008,00	50,00	16.028.016,00	100,00
3	1.20.03.00.00.4.3.3.01.03		DANA BAGI HASIL DARI BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR	30.306.202.480,05	15.153.101.240,00	11.051.320.731,00	36,47	26.204.421.971,00	86,47
4	1.20.03.00.00.4.3.3.01.05		DANA BAGI HASIL DARI PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR	30.603.300.000,00	15.301.650.000,00	13.387.336.710,35	43,74	28.688.986.710,35	93,74
5	1.20.03.00.00.4.3.3.01.06		DANA BAGI HASIL DARI PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH	118.264.000,00	559.132.000,00	559.132.000,00	472,78	1.118.264.000,00	945,57
6	1.20.03.00.00.4.3.3.01.08		DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI BAGIAN TAHUN LALU	17.337.553.191,23	-	17.337.553.191,23	100,00	17.337.553.191,23	100,00
			JUMLAH PENERIMAAN III.1 :	101.572.413.486,41	42.617.430.146,00	56.506.403.059,58	55,63	99.123.833.205,58	97,59
	1.20.03.00.00.4.3.4	III.2	DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS :						
6	1.20.03.00.00.4.3.4.01.03		DANA PENYESUAIAN	14.000.000.000,00	-	14.000.000.000,00	100,00	14.000.000.000,00	100,00
			JUMLAH PENERIMAAN III.2 :	14.000.000.000,00	-	14.000.000.000,00	100,00	14.000.000.000,00	100,00
			JUMLAH PENERIMAAN III (III.1 + III.2) :	115.572.413.486,41	42.617.430.146,00	70.506.403.059,58	61,01	113.123.833.205,58	97,88



REKENING	JENIS PENERIMAAN	TARGET	S/D BULAN LALU	EULAN INI				
	I.1 PAJAK DAERAH	51.475.000.000,00	46.432.046.154,06	5.054.821.453,00	9,82	51.486.867.607,06	100,02	
	I.2 RETRIBUSI DAERAH	55.999.049.227,00	44.039.947.163,00	4.532.211.055,00	8,09	48.572.158.218,00	86,74	
	I.3 HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	2.750.000.000,00	-	2.366.826.719,28	-	2.366.826.719,28	86,07	
4	I.4 LAIN-LAIN PAD YANG SYAH	21.325.035.465,20	32.233.321.132,13	7.469.145.628,00	35,03	39.702.466.760,13	186,18	
	JUMLAH PENERIMAAN PAD :	131.549.084.692,20	122.705.314.449,19	19.423.004.855,28	14,76	142.128.319.304,47	108,04	
5	II.1 BAGI HASIL PAJAK / BUKAN PAJAK	169.619.149.177,00	129.952.655.300,00	55.533.368.227,00	32,74	185.486.023.527,00	109,35	
6	II.2 DANA ALOKASI UMUM (DAU)	659.611.000.000,00	659.611.000.000,00	54.968.500.000,00	8,33	714.579.500.000,00	108,33	
7	II.3 DANA ALKASI KHUSUS	8.387.000.000,00	7.602.419.819,00	5.801.200.000,00	69,17	13.403.619.819,00	159,81	
8	III LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SYAH	115.572.413.486,41	42.617.430.146,00	70.506.403.059,58	61,01	113.123.833.205,58	97,88	
	JUMLAH PENERIMAAN PAD + (II.1 + II.2 + II.3 + III) :	1.084.738.647.355,61	962.488.819.714,19	206.232.476.141,86	19,01	1.168.721.295.856,05	107,74	

MENGETAHUI
WALIKOTA PALEMBANG

H. EDDY SANTANA PUTRA

PALANGKARAYA, JANUARI 2008
KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KOTA PALEMBANG

Dra. H. SUMIYAH, MZ, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.130805523

TEMBUSAN : KEPADA YTH :

1. GUBERNUR PROPINSI SUMATERA SELATAN
2. KEPALA BADAN PENGAWAS PROPINSI SUMATERA SELATAN
3. ASISTEN I BIDANG PEMERINTAHAN SETDA SUMATERA SELATAN
4. KEPALA BIRO KEUANGAN SETDA SUMATERA SELATAN
5. KEPALA BIRO PEMERINTAHAN UMUM SETDA SUMATERA SELATAN
6. KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN
7. KEPALA PERWAKILAN II BPK PALEMBANG
8. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG
9. KETUA KOMISI II DPRD KOTA PALEMBANG
10. INSPEKTUR KOTA PALEMBANG
11. KEPALA BAGIAN KEUANGAN KOTA PALEMBANG

NO	KODE REKUNING	JENIS PENERIMAAN	TARGET	REALISASI		%	S/D BULAN INI		
				S/D BULAN LALU	BULAN INI				
	1.1	A. PAJAK DAERAH							
1	1.01.05.1.1.01.01	PAJAK HOTEL	4.700.000.000,00	4.021.398.109,00	51.409.138,00	10,94	4.535.807.247,00	96,51	Dipenda
2	1.01.05.1.1.02.01	PAJAK RESTORAN	8.600.000.000,00	7.872.597.660,80	821.275.295,00	9,55	8.693.872.955,80	101,09	Dipenda
3	1.01.05.1.1.03.01	PAJAK HIBURAN	2.000.000.000,00	1.565.226.820,00	228.297.885,00	11,41	1.793.524.705,00	89,68	Dipenda
4	1.01.05.1.1.04.01	PAJAK REKLAME	3.700.000.000,00	3.212.505.158,00	415.901.976,00	11,24	3.628.407.134,00	98,07	Dipenda
5	1.01.05.1.1.05.01	PAJAK PENERANGAN JALAN	22.500.000.000,00	22.623.517.018,90	2.221.362.734,00	9,87	24.844.879.752,00	110,42	Dipenda
6	1.01.05.1.1.06.01	PAJAK PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOL. C	600.000.000,00	281.451.457,00	226.378.575,00	37,73	507.830.032,00	84,64	Dipenda
7	1.01.05.1.1.07.01	PAJAK PARKIR	1.125.000.000,00	954.761.500,00	98.265.500,00	8,73	1.053.027.000,00	93,60	Dipenda
		JUMLAH PENERIMAAN : A	43.225.000.000,00	40.531.457.722,80	4.525.891.103,00	10,47	45.057.348.825,80	104,24	
	1.2	B. RETRIBUSI DAERAH							
1	1.01.11.1.2.03.01	RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA KTP	1.250.146.000,00	133.265.800,00	105.396.540,00	8,36	238.662.340,00	18,94	Kecamatan
2	1.01.11.1.2.13.06	RET. SEWA GEDUNG KEC. (Sako, IT I, IT II, IB I, Sukrami)	55.000.000,00	38.038.380,00	-	-	38.038.380,00	69,16	Kecamatan
3	1.01.11.1.2.33.01	PUNGUTAN BIAYA ADMINISTRASI (LEGES)	200.000.000,00	89.525.000,00	11.233.000,00	5,62	100.758.000,00	50,38	Kecamatan
4	1.02.01.1.2.15.01	RETRIBUSI JASA USAHA TEMPAT PENDARATAN IKAN	150.000.000,00	133.584.984,00	17.181.590,00	11,45	150.766.574,00	100,51	Pertanian
5	1.02.01.1.2.20.01	RETRIBUSI JASA USAHA RUMAH POTONG HEWAN (RPH)	600.000.000,00	277.120.000,00	24.285.000,00	4,05	301.405.000,00	50,23	Pertanian
6	1.02.01.1.2.40.01	RETRIBUSI USAHA KEHUTANAN	100.000.000,00	79.854.175,00	7.889.450,00	7,89	87.743.625,00	87,74	Pertanian
7	1.02.01.1.2.41.01	RET. PENGUSAHAAN & PENGELOLAAN SARANG WALET	150.000.000,00	-	-	-	-	-	Pertanian
8	1.06.01.1.2.30.01	RETRIBUSI TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP)	150.000.000,00	106.315.450,00	8.300.900,00	5,53	114.616.350,00	76,41	Diperindag
9	1.06.01.1.2.31.01	RETRIBUSI IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)	400.000.000,00	236.050.000,00	16.200.000,00	4,05	252.250.000,00	63,06	Diperindag
10	1.06.01.1.2.32.01	RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI (IUI)	50.000.000,00	18.812.500,00	707.000,00	1,41	19.519.500,00	39,34	Diperindag
11	1.06.01.1.2.33.01	RETRIBUSI PENYIMPANAN DAN ATAU PENYALURAN BAHAN MIGAS DAN NON MIGAS (PPBm & NM)	200.000.000,00	159.612.752,00	22.621.450,00	11,31	182.234.202,00	91,12	Diperindag
12	1.08.01.1.2.28	RETRIBUSI IZIN GANGGUAN	1.870.000.000,00	1.753.094.430,00	246.364.040,00	13,17	1.999.458.470,00	106,92	PMD
13	1.09.01.1.2.41.01	RETRIBUSI PEMINAAN DAN PENGAWASAN NORMA KESELAMATAN KERJA	150.000.000,00	125.500.060,00	8.778.400,00	5,85	134.278.460,00	89,52	Disnaker
14	1.09.01.1.2.42.02	RETRIBUSI PEMBINAAN PERUSAHAAN DAN KETENAGA KERJAAN	65.000.000,00	43.085.000,00	325.000,00	0,50	43.410.000,00	66,78	Disnaker
15	1.10.01.1.2.38	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN	4.100.000.000,00	4.167.280.930,00	-	-	4.167.280.930,00	101,64	Dinkes
16	1.10.02.1.2.01	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN	5.945.579.277,00	5.901.265.105,00	625.992.250,00	10,53	6.527.257.355,00	109,78	RS. BARI
17	1.11.01.1.2.13.06	RETRIBUSI IZIN SEWA GEDUNG /RUANGAN/AULA	50.000.000,00	24.240.000,00	22.760.000,00	45,52	47.000.000,00	94,00	Diknas
18	1.12.01.1.2.42.01	RETRIBUSI PPUT, PPUM	12.500.000,00	21.475.000,00	1.100.000,00	8,80	22.575.000,00	180,60	Dinsos
19	1.12.01.1.2.42.02	RETRIBUSI PANGKAS RAMBUT DAN SALON	13.500.000,00	6.485.000,00	275.000,00	2,04	6.760.000,00	50,07	Dinsos
20	1.13.01.1.2.11.01	RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA SITUASI	250.000.000,00	84.200.000,00	7.020.000,00	2,81	91.220.000,00	36,49	Tata Kota
21	1.13.01.1.2.26.01	RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)	22.500.000.000,00	11.370.940.950,00	1.154.449.800,00	5,13	12.525.390.750,00	55,67	Tata Kota
22	1.13.01.1.2.36.01	RETRIBUSI IZIN PENGGUNAAN TANAH (IPT)	225.000.000,00	232.942.800,00	20.494.000,00	9,11	253.436.800,00	112,64	Tata Kota
23	1.13.01.1.2.37.01	RET. PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN REKLAME	1.500.000.000,00	1.183.323.637,00	215.673.825,00	14,38	1.398.997.462,00	93,27	Tata Kota

24	1.14.01.1.2.10.01	RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PBK	300.000.000,00	215.299.589,00	30.494.285,00	100,6	245.793.874,00	81,95	PBK
25	1.15.01.1.2.13.09	RETRIBUSI SEWA LABORATORIUM	125.000.000,00	93.550.000,00	31.500.000,00	25,20	125.050.000,00	100,04	PU
26	1.15.01.1.2.13.19	RET. PEMB. & RET. PENGENDA. PEMANFAATAN RAWA	200.000.000,00	122.332.400,00	2.539.700,00	1,27	124.872.100,00	62,44	PU
27	1.15.01.1.2.31.01	RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (TUJK)	200.000.000,00	168.198.000,00	4.132.000,00	2,97	172.330.000,00	86,17	PU
28	1.15.01.1.2.34.01	RET. IZIN GALLAN PAM, TELKOM, GAS, LISTRIK, & GOL. C	100.000.000,00	15.030.000,00	1.115.000,00	1,12	16.145.000,00	16,15	PU
29	1.16.01.1.2.07.01	RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM	5.036.000.000,00	2.227.997.400,00	209.099.800,00	4,35	2.437.097.200,00	48,39	Dishub
30	1.16.01.1.2.09.01	RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	3.600.000.000,00	2.233.816.780,00	246.103.380,00	6,84	2.479.920.160,00	68,89	Dishub
31	1.16.01.1.2.16.01	RETRIBUSI TERMINAL	2.000.000.000,00	1.258.608.450,00	147.145.750,00	7,36	1.405.754.200,00	70,29	Dishub
32	1.16.01.1.2.23.01	RETRIBUSI JASA ANGKUTAN LAUT, (JASA) SUNGAI & PENYEBERANGAN (ASDP)	1.000.000.000,00	562.842.300,00	42.658.500,00	4,27	605.500.800,00	60,55	Dishub
33	1.16.01.1.2.29.01	RETRIBUSI IZIN TRAYEK	1.000.000.000,00	1.232.385.000,00	134.195.000,00	13,42	1.366.580.000,00	136,66	Dishub
34	1.16.01.1.2.39.01	RETRIBUSI PEMBINAAN PERHUBUNGAN UDARA DAN TELEKOMUNIKASI	400.000.000,00	384.514.600,00	37.720.200,00	9,43	422.234.800,00	105,56	Dishub
35	1.16.01.1.2.45.01	RETRIBUSI BECA	30.000.000,00	1.170.000,00	-	-	1.170.000,00	3,90	Dishub
36	1.16.02.1.2.40.01	RETRIBUSI PEMBINAAN PEMANFAATAN MEDIA INFORMASI DAN KOMUNIKASI	50.000.000,00	10.350.000,00	825.000,00	1,65	11.175.000,00	22,35	Infokom
37	1.17.01.1.2.02	RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN	2.000.000.000,00	905.572.000,00	98.255.000,00	4,91	1.003.827.000,00	50,19	DKK
38	1.17.01.1.2.05	RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN	60.000.000,00	66.550.000,00	6.650.000,00	11,98	73.200.000,00	122,00	DKK
39	1.17.01.1.2.06	RETRIBUSI PELAYANAN PENGABUAN MAYAT	75.000.000,00	21.400.000,00	2.000.000,00	2,67	23.400.000,00	31,20	DKK
40	1.17.01.1.2.19	RETRIBUSI JASA USAHA PENYEDOTAN TINJA	125.000.000,00	52.141.500,00	4.543.000,00	3,63	56.684.500,00	45,35	DKK
41	1.17.02.1.2.13.01	RET. JASA LABORATORIUM (ANALISA LIMBAH CAIR INDUSTRI)	45.000.000,00	23.168.000,00	7.439.000,00	11,53	30.607.000,00	68,02	Bapedalda
42	1.17.02.1.2.24.01	- RETRIBUSI IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR	3.500.000.000,00	517.340.026,50	34.449.014,00	1,98	551.789.040,50	15,77	Bapedalda
43	1.17.02.1.2.24.02	- RETRIBUSI JENIS USAHA DAN ATAU KEGIATAN YANG WAJIB KAJIAN LINGKUNGAN	50.000.000,00	2.650.000,00	225.000,00	4,45	2.875.000,00	5,75	Bapedalda
44	1.18.01.1.2.04.01	RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK AKTA CAPIL	349.247.250,00	174.084.200,00	16.965.900,00	4,26	191.050.100,00	54,70	Capil
45	1.20.01.1.2.38.01	RETRIBUSI PEMBINAAN USAHA KEPARIWISATAAN	800.000.000,00	298.310.300,00	27.489.000,00	3,44	325.799.300,00	40,72	Pariwisata
JUMLAH PENERIMAAN : B			61.041.972.527,00	36.773.322.498,50	3.602.591.774,00	5,90	40.375.914.272,50	66,14	
1.3 C. HASIL PRSH MILIK DAERAH & HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN									
1	1.01.03.1.3.02	BAGIAN LABA LEMBAGA KEUNGAN BANK :							
2	1.01.03.1.3.02.01	BANK PEMBANGUNAN DAERAH	1.000.000.000,00	-	821.389.463,07	82,14	821.389.463,07	82,14	
JUMLAH PENERIMAAN : C			1.000.000.000,00	-	821.389.463,07	82,14	821.389.463,07	82,14	

	1.4	D. LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SYAH							
1	1.01.03.1.4.01.01	HASIL PENJUALAN ASET DAERAH YANG DIPISAHKAN	150.000.000,00	115.117.160,00	28.324.000,00	18,88	143.441.160,00	95,63	
2	1.01.03.1.4.02.01	PENERIMAAN JASA GIRO	1.450.000.000,00	1.185.238.993,00	35.744.134,00	2,47	1.220.983.127,00	84,21	
3	1.01.03.1.4.05.01	PENERIMAAN BUNGA DEPOSITO (BPDSS)	6.005.855.777,00	8.623.958.310,00	918.333.320,00	15,29	9.542.291.630,00	158,88	
4	1.01.03.1.4.06.01	PENERIMAAN GANTI RUGI ATAS KEKAYAAN DAERAH (TP/TGR)	75.000.000,00	38.482.500,00	3.000.000,00	4,00	41.482.500,00	55,31	
		JUMLAH PENERIMAAN : D	7.680.855.777,00	- 9.962.796.963,00	985.401.454,00	12,83	10.948.198.417,00	142,54	
		JUMLAH PENERIMAAN RUTIN (A + B + C + D) / PAD	112.947.828.304,00	87.267.577.184,30	9.935.273.794,07	8,80	97.202.850.978,37	86,06	
	1.5	E. BAGI HASIL PAJAK/BUKAN PAJAK BAGI HASIL PAJAK :							
1	1.01.03.2.1.01.03	PAJAK PENGHASIL. ORG. PRIB. TERMASUK PPH PS. 21	26.320.955.949,00	15.792.573.570,00	12.298.417.803,00	46,72	28.090.991.373,00	106,72	
2	1.01.03.2.4.01.01	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	30.200.000.000,00	11.764.778.566,83	6.518.206.314,00	21,58	18.282.984.880,83	60,54	
3	1.01.03.2.4.01.02	PAJAK KENDARAAN DI ATAS AIR	40.000.000,00	13.577.404,00	23.578.865,00	58,95	37.156.269,00	92,89	
4	1.01.03.2.4.01.03	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	29.920.000.000,00	11.216.034.184,50	5.776.161.953,00	19,31	16.992.196.137,50	56,79	
5	1.01.03.2.4.01.05	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMTR (PBBKB)	10.584.000.000,00	9.954.659.462,49	6.803.438.323,00	64,28	16.758.097.785,49	158,33	
6	1.01.03.2.4.01.06	PAJAK PENGAMBILAN AIR PERMUKAAN & ABT	1.529.500.000,00	116.318.169,34	58.843.586,00	3,85	175.161.755,34	11,45	
7	1.01.05.2.1.01.01	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)	44.620.968.960,00	28.490.410.197,00	10.297.029.740,00	23,05	38.787.439.937,00	86,95	
8	1.01.05.2.1.01.02	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	14.500.000.000,00	12.974.454.327,00	2.277.133.252,00	15,70	15.251.587.579,00	105,18	
9	1.01.05.2.1.01.03	PENERIMAAN BIAYA PEMUNGUTAN PBB	2.695.694.292,00	2.114.057.027,00	668.711.301,00	24,81	2.782.768.328,00	103,23	
10	1.01.05.2.1.01.04	PENERIMAAN INSENTIF PBB DAN BPHTB	2.328.890.041,00	-	-	-	-	-	
11	1.01.05.2.1.01.05	PEN. BPHTB BAGIAN PEMERINTAH PUSAT	2.405.512.528,00	1.202.756.264,00	23.347.626,00	0,97	1.226.103.890,00	50,97	
		JUMLAH BAGI HASIL PAJAK	165.145.521.770,00	93.639.619.172,16	44.744.868.763,00	27,09	138.384.487.935,16	83,80	
		BAGI HASIL BUKAN PAJAK/SDA :							
1	1.01.03.2.1.02.01	PROVISI SUMBER DAYA HUTAN (PSDH)	229.899.500,00	-	72.578.307,00	31,57	72.578.307,00	31,57	
2	1.01.03.2.1.02.03	IURAN TETAP (LANDRENT)	150.000.000,00	-	-	-	-	-	
3	1.01.03.2.1.02.06	PERIKANAN	1.272.727.270,00	139.224.028,00	42.850.181,00	3,37	182.074.209,00	14,31	
4	1.01.03.2.1.02.08	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI	20.000.000.000,00	27.147.915.552,00	8.394.516.126,00	41,37	35.424.331.688,00	177,71	
5	1.01.03.2.1.02.09	PERTAMBANGAN GAS ALAM	22.072.000.000,00	23.163.760.027,00	7.242.570.571,00	32,81	30.406.330.598,00	137,76	
6	1.01.03.2.1.02.10	PERTAMBANGAN UMUM	2.402.470.150,00	1.165.395.589,00	428.781.506,00	17,85	594.177.095,00	66,36	
		JUMLAH BAGI HASIL BUKAN PAJAK	46.127.096.920,00	51.616.295.206,00	16.181.296.691,00	33,08	67.797.591.897,00	146,98	
		JUMLAH PENERIMAAN : E	211.272.618.690,00	145.255.914.378,16	60.926.165.454,00	28,84	206.182.079.832,16	97,59	
	1.6	F DANA ALOKASI UMUM (DAU)	551.149.000.000,00	551.149.000.000,00	-	-	551.149.000.000,00	100,00	
		JUMLAH PENERIMAAN F	551.149.000.000,00	551.149.000.000,00	-	-	551.149.000.000,00	100,00	
	1.7	G. DANA ALOKASI KHUSUS :							
		- DANA ALOKASI KHUSUS	9.940.000.000,00	2.034.000.000,00	7.906.000.000,00	79,34	9.940.000.000,00	100,00	
		- DANA ALOKASI KHUSUS REBOISASI	23.284.600,00	-	-	-	-	-	
		JUMLAH PENERIMAAN G	9.963.284.600,00	2.034.000.000,00	7.906.000.000,00	79,35	9.940.000.000,00	100,00	

	1.01.03.3.1.03.01	BANTUAN DARI BANK SUMSEL	700.000.000,00	-	-	-	2.000.000.000,00	100,00
	1.01.03.3.1.03.02	KONTRIBUSI PASAR KEPANDEAN	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	-	-	200.000.000,00	26,67
	1.01.03.3.1.03.03	KONTRIBUSI BASEMENT PASAR 16 ILER	750.000.000,00	200.000.000,00	-	-	200.000.000,00	26,67
	1.01.03.3.1.03.04	KONTRIBUSI PDAM TIRTA MUSI PALEMBANG	1.000.000.000,00	-	1.000.000.000,00	100,00	1.000.000.000,00	100,00
2	1.01.03.3.1.04.01	PENERIMAAN LAIN - LAIN	7.700.000.000,00	4.570.261.312,00	669.423.364,00	8,69	5.239.684.676,00	68,65
3	1.01.03.3.1.05.01	PENERIMAAN BAGI HASIL PJK PROVINSI TAHUN 2005	21.074.107.400,00	21.074.107.400,00	-	-	21.074.107.400,00	100,00
		JUMLAH PENERIMAAN H	33.224.107.400,00	27.844.368.712,00	1.669.423.364,00	5,02	29.513.792.076,00	88,83
		REKAPITULASI						
1	1.1	A. PAJAK DAERAH	43.225.000.000,00	40.531.457.722,80	4.525.891.103,00	10,47	45.057.348.825,80	104,24
2	1.2	B. RETRIBUSI DAERAH	61.041.972.527,00	36.773.322.498,50	3.602.591.774,00	5,90	40.375.914.272,50	66,14
3	1.3	C. HASIL PERUSAHAAN MILIK DAERAH DAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YG DIPISAHKAN	1.000.000.000,00	-	821.389.463,07	82,14	821.389.463,07	82,14
4	1.4	D. LAIN-LAIN PAD YANG SYAH	7.680.855.777,00	9.962.796.963,00	985.401.454,00	12,83	10.948.198.417,00	142,54
		JUMLAH (PAD)	112.947.828.304,00	87.267.577.184,30	9.935.273.794,07	8,80	97.202.850.978,37	86,06
5	1.5	E. BAGI HASIL PAJAK / BUKAN PAJAK	211.272.618.690,00	145.255.914.378,16	60.926.165.454,00	28,84	206.182.079.832,16	97,59
6	1.6	F. DANA ALOKASI UMUM	551.149.000.000,00	551.149.000.000,00	-	-	551.149.000.000,00	100,00
7	1.7	G. DANA ALOKASI KHUSUS	9.963.284.600,00	2.034.000.000,00	7.906.000.000,00	79,35	9.940.000.000,00	99,77
8	1.8	H. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SYAH	33.224.107.400,00	27.844.368.712,00	1.669.423.364,00	8,02	29.513.792.076,00	88,83
		JUMLAH (PAD) +F+G+H	918.556.838.994,00	813.550.860.274,46	80.436.862.612,07	8,76	893.987.727.886,53	97,33

MENGETAHUI
WALIKOTA PALEMBANG



HEDDY SANTANA PUTRA

PALEMBANG, 26 JANUARI 2007

DINAS PENDAPATAN DAERAH
KOTA PALEMBANG



SUSMAIYAH, MZ, MM
PENBINA UTAMA MUDA
NIP. 130805523

- TEMBUSAN : KEPADA YTH :
1. GUBERNUR PROVINSI SUMATERA SELATAN
 2. KEPALA BADAN PENGAWAS PROPNSI SUMATERA SELATAN
 3. ASISTEN I BIDANG PEMERINTAHAN SETDA SUMETERA SELATAN
 4. KEPALA BIRO KEUANGAN SETDA SUMETRA SELATAN
 5. KEPALA BIRO PEMERINTAHAN UMUM SUMATERA SELATAN
 6. KEPALA PERWAKILAN II BPK RI DI PALEMBANG
 7. KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH SUMETRA SELATAN
 8. KETUA KOMISI II DPRD KOTA PALEMBANG
 9. KEPALA KEPAKSAAN NEGERI PALEMBANG
 10. KEPALA BAGIAN KEUANGAN KOTA PALEMBANG
 11. INSPEKTUR KOTA PALEMBANG

NO	KODE REKENING	JENIS PENERIMAAN	TARGET	REALISASI - PENERIMAAN		%	S/D BULAN INI	%	KET.
				S/D BULAN LALU	BULAN INI				
	1.1	A. PAJAK DAERAH							
1	1.01.05.1.1.01	PAJAK HOTEL	4.100.000.000,00	3.636.165.197,00	490.080.026,00	11,95	4.126.245.223,00	100,64	
2	1.01.05.1.1.02	PAJAK RESTORAN	8.000.000.000,00	6.484.207.861,00	808.149.129,00	10,10	7.292.356.990,00	91,15	
3	1.01.05.1.1.03	PAJAK HIBURAN	1.750.000.000,00	1.354.859.077,00	198.435.476,00	11,34	1.553.294.553,00	88,76	
4	1.01.05.1.1.04	PAJAK REKLAME	3.000.000.000,00	2.671.400.030,00	331.665.434,00	11,06	3.003.065.464,00	100,10	
5	1.01.05.1.1.05	PAJAK PENERANGAN JALAN	26.000.000.000,00	18.633.883.974,00	1.927.916.042,00	7,42	20.561.800.016,00	79,08	
6	1.01.05.1.1.06	PAJAK PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOL. C	500.000.000,00	493.986.841,00	56.624.495,00	11,32	550.611.336,00	110,12	
7	1.01.05.1.1.07	PAJAK PARKIR	750.000.000,00	711.832.960,00	63.495.600,00	8,47	775.328.560,00	103,38	
		JUMLAH PENERIMAAN : A	44.100.000.000,00	33.986.335.940,00	3.876.366.202,00	8,79	37.862.702.142,00	85,86	
	1.2	B. RETRIBUSI DAERAH							
1	1.01.11.1.2.33	RETRIBUSI PUNGUTAN ADMINISTRASI (LEGES)	200.000.000,00	105.598.000,00	11.108.000,00	5,55	116.706.000,00	58,35	
2	1.02.01.1.2.15	RETRIBUSI PEMBINAAN USAHA PEKIKANAN	100.000.000,00	102.497.396,00	10.592.057,00	10,59	113.089.453,00	113,09	
3	1.02.01.1.2.20	RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN	343.000.000,00	279.880.300,00	24.530.000,00	7,15	304.410.000,00	88,75	
4	1.02.01.1.2.40	RETRIBUSI USAHA HASIL KEHUTANAN	85.000.000,00	53.453.350,00	6.089.800,00	7,16	59.543.150,00	70,05	
5	1.02.01.1.2.41	RETRIBUSI PENG & PENGELOLAAN SARANG WALET	75.000.000,00	-	-	-	-	-	
6	1.06.01.1.2.30	RET. PENERIMAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN	125.000.000,00	100.549.300,00	9.405.800,00	7,52	109.955.100,00	87,96	
7	1.06.01.1.2.31	RETRIBUSI IZIN PENERIMAAN SIU PERDAGANGAN	350.000.000,00	234.650.000,00	18.150.000,00	5,19	252.800.000,00	72,23	
8	1.06.01.1.2.32	RETRIBUSI PENERIMAAN USAHA INDUSTRI	25.000.000,00	13.406.500,00	2.637.500,00	10,55	16.044.000,00	64,18	
9	1.06.01.1.2.33	RET. PEN. PPBM&NON MIGAS (BHN MIGAS & NON MIGAS)	130.000.000,00	159.372.360,00	4.367.450,00	3,36	163.739.830,00	125,95	
10	1.06.02.1.2.08	RETRIBUSI PELAYANAN PASAR	4.225.951.000,00	2.182.127.183,00	258.915.126,00	6,13	2.441.042.309,00	57,76	
11	1.06.02.1.2.14	RETRIBUSI PERPASARAN SWASTA	66.800.000,00	34.273.000,00	1.500.000,00	2,25	35.773.000,00	53,55	
12	1.08.01.1.2.28	RETRIBUSI IZIN GANGGUAN	1.700.000.000,00	1.477.885.607,00	235.522.070,00	13,85	1.713.407.677,00	100,79	
13	1.09.01.1.2.41	RET. PEMB. DAN PENG. NORMA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA	135.000.000,00	126.177.117,00	12.053.800,00	8,93	138.230.917,00	102,39	
14	1.09.01.1.2.42	RET. PEMB. PERUSAHAAN DAN KETENAGAKERJAAN	65.000.000,00	44.255.000,00	4.895.000,00	7,53	49.150.000,00	75,62	
15	1.10.01.1.2.38	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN	3.500.000.000,00	1.921.258.555,00	323.134.870,00	9,23	2.244.393.725,00	64,13	
16	1.10.02.1.2.01	RETRIBUSI KES. RSUD PALEMBANG BARI	1.750.000.000,00	2.195.211.315,00	756.433.125,00	43,22	2.951.644.440,00	168,67	
17	1.12.01.1.2.42.01	RETRIBUSI PPUT, PPU	12.500.000,00	13.175.000,00	100.000,00	0,80	13.275.000,00	106,20	
18	1.12.01.1.2.42.02	RETRIBUSI PANGKAS RAMBUT DAN SALON	13.500.000,00	12.945.000,00	75.000,00	0,56	13.020.000,00	96,44	
19	1.13.01.1.2.11	RETRIBUSI PENGGANTIAN BLAYA CETAK PETA	250.000.000,00	102.875.000,00	7.455.000,00	2,98	110.330.000,00	44,13	

20	1.13.01.1.2.26	RETRIBUSI MENDIRIKAN BANGUNAN ✓	19.000.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00	19,00	19.000.000,00	19,00
21	1.13.01.1.2.36	RETRIBUSI PENGGUNAAN TANAH	100.000.000,00	60.453.000,00	23.817.000,00	23,82	84.270.000,00	84,27
22	1.13.01.1.2.37	RET. PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN REKLAME	650.000.000,00	519.988.668,00	125.915.948,00	19,37	645.904.616,00	99,37
23	1.14.01.1.2.10	RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PBK	250.000.000,00	122.393.560,00	13.024.580,00	5,21	135.418.140,00	54,17
24	1.15.01.1.2.13	RETRIBUSI ALAT BERAT	90.000.000,00	5.870.000,00	-	-	5.870.000,00	6,52
25	1.15.01.1.2.14	RETRIBUSI LABORATORIUM	60.000.000,00	49.750.000,00	35.750.000,00	59,58	85.500.000,00	142,50
26	1.15.01.1.2.31	RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (IUK)	200.000.000,00	127.687.500,00	2.150.000,00	1,08	129.837.500,00	64,92
27	1.15.01.1.2.31	RET. PEMB. & RET. PENGENDA. PEMANFAATAN RAWA	150.000.000,00	189.953.500,00	-	-	189.953.500,00	126,64
28	1.15.01.1.2.34	RET. GALIAN PAM, TELKOM, GAS, LISTRIK, GOL. C	100.000.000,00	16.904.000,00	1.937.000,00	1,94	18.841.000,00	18,84
29	1.16.01.1.2.07	RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM	5.036.000.000,00	2.399.680.000,00	89.279.500,00	1,77	2.488.959.500,00	49,42
30	1.16.01.1.2.09	RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	2.850.000.000,00	2.120.043.580,00	219.199.940,00	7,69	2.339.243.520,00	82,08
31	1.16.01.1.2.16	RETRIBUSI TERMINAL	1.750.000.000,00	1.353.955.300,00	188.328.250,00	10,76	1.542.283.550,00	88,13
32	1.16.01.1.2.23	RETRIBUSI JASA ANGKUTAN (ASDP) PENYEBERANGAN	300.000.000,00	243.559.000,00	27.955.500,00	9,32	271.514.500,00	90,50
33	1.16.01.1.2.29	RETRIBUSI IZIN TRAYEK	250.000.000,00	159.300.000,00	15.545.000,00	6,22	174.845.000,00	69,94
34	1.16.01.1.2.39	RETRIBUSI PEMBINAAN PERHUBUNGAN UDARA DAN TELEKOMUNIKASI	75.000.000,00	3.200.000,00	2.835.000,00	3,78	6.035.000,00	8,05
35	1.16.01.1.2.45	RETRIBUSI BECA	75.000.000,00	4.745.000,00	-	-	4.745.000,00	6,33
36	1.16.02.1.2.40	RETRIBUSI PEMBINAAN PEMANFAATAN MEDIA INFORMASI DAN KOMUNIKASI	20.000.000,00	10.975.000,00	525.000,00	2,63	11.500.000,00	57,50
37	1.17.01.1.2.02	RETRIBUSI PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN	1.803.900.000,00	849.169.500,00	115.008.000,00	6,38	964.177.500,00	53,45
38	1.17.01.1.2.05	RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN	40.850.000,00	35.500.000,00	6.200.000,00	15,18	41.700.000,00	102,08
39	1.17.01.1.2.05	RETRIBUSI PELAYANAN PENGABUAN MAYAT	55.250.000,00	12.800.000,00	300.000,00	0,54	13.100.000,00	23,71
40	1.17.01.1.2.19	RETRIBUSI PENYEDOTAN TINJA	100.000.000,00	55.193.500,00	5.823.500,00	5,82	61.017.000,00	61,02
41	1.17.02.1.2.13	RETRIBUSI SEWA LABORATORIUM	45.000.000,00	22.146.750,00	56.347.500,00	125,22	78.494.250,00	174,43
42	1.17.02.1.2.24	RETRIBUSI JASA USAHA PENGOLAHAN LIMBAH CAIR	3.300.000.000,00	500.570.075,00	37.776.194,00	1,14	538.346.269,00	16,31
43	1.17.02.1.2.25	RETRIBUSI PEMBINAAN BAGI JENIS USAHA YANG WAJIB KAJIAN LINGKUNGAN	2.500.000,00	4.675.000,00	1.000.000,00	40,00	5.675.000,00	227,00
44	1.18.01.1.2.03	RETRIBUSI PENGGUNAAN BIAYA CETAK KTP ✓	1.160.146.000,00	1.190.749.050,00	138.081.900,00	11,90	1.328.830.950,00	114,54
45	1.18.01.1.2.04	RETRIBUSI PENGGUNAAN BIAYA CETAK AKTA ✓	589.854.000,00	198.021.350,00	18.237.850,00	3,09	216.259.200,00	36,66
46	1.18.01.1.2.08	RETRIBUSI USAHA KEPARIWISATAAN	400.000.000,00	346.945.550,00	31.563.000,00	7,89	378.508.550,00	94,63
4	1.11.07.12.13.06	RETRIBUSI IZIN SEWA GEDUNG/RUANGAN / AULA	50.000.000,00	13.400.000,00	2.080.000,00	4,16	15.480.000,00	30,96
JUMLAH PENERIMAAN : B			51.655.251.000,00	36.175.171.886,00	3.728.879.660,00	7,22	39.904.051.546,00	77,25
13 C. BAGIAN LABA USAHA DAERAH								
1	1.01.03.13.01	BAGI LABA PDAM	2.000.000.000,00	-	2.000.000.000,00	100,00	2.000.000.000,00	100,00
2	1.01.03.13.02	BANK PEMBANGUNAN DAERAH	1.000.000.000,00	124.483.866,71	696.282.599,00	69,63	820.766.465,71	82,08
JUMLAH PENERIMAAN : C			3.000.000.000,00	124.483.866,71	2.696.282.599,00	89,88	2.820.766.465,71	94,03

1	1.01.03.1.4.01	HASIL PENJUALAN ASET DAERAH	141.283.500,00	35.116.900,00	1.800.000,00	1,27	36.916.900,00	26,13
2	1.01.03.1.4.02	PENERIMAAN JASA GIRO	850.000.000,00	1.281.901.306,00	141.927.078,00	16,70	1.423.828.384,00	167,51
3	1.01.03.1.4.05	PENERIMAAN BAGI DEPOSITO (BPDSS)	1.100.000.000,00	1.164.416.670,00	247.500.000,00	22,50	1.411.916.670,00	128,36
4	1.01.03.1.4.06	PENERIMAAN GANTI RUGI ATAS KEKAYAAN DAERAH (TP/TGR)	75.000.000,00	43.249.300,00	6.346.500,00	8,46	49.595.800,00	66,13
5	1.01.03.1.4.07	PENERIMAAN LAIN-LAIN	4.936.457.465,00	2.573.229.698,50	17.097.842,00	0,35	2.590.327.540,50	52,47
		JUMLAH PENERIMAAN : D	7.102.740.965,00	5.097.913.874,50	414.671.420,00	5,84	5.512.585.294,50	77,61
		JUMLAH PENERIMAAN RUTIN (A + B + C + D) / PAD	105.857.991.965,00	75.383.905.567,21	10.716.199.881,00	10,12	86.100.105.448,21	81,34
	2	E. BAGI HASIL PAJAK/BUKAN PAJAK BAGI HASIL PAJAK :						
1	1.03.2.1.01.03	BAGI HASIL PAJAK PPH 21	26.000.000.000,00	16.241.853.396,00	6.855.013.416,00	26,37	23.096.866.812,00	88,83
2	1.03.2.4.01.01	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	28.200.000.000,00	10.125.620.611,45	4.793.640.622,36	17,00	14.919.261.233,81	52,91
3	1.03.2.4.01.03	BEA BALIK NAMA (BBNKB)	29.920.000.000,00	12.384.127.388,45	4.783.460.444,00	15,99	17.167.587.832,45	57,38
4	1.03.2.4.01.05	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR	10.584.000.000,00	-	9.684.150.661,40	91,50	9.684.150.661,40	91,50
5	1.03.2.4.01.06	PAJAK PENGAMBILAN AIR PERMUKAAN & ABT	1.529.500.000,00	20.490.245,00	441.072.170,00	28,84	461.562.415,00	30,18
6	1.05.2.1.01.01	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN	41.000.000.000,00	40.414.667.561,00	12.353.280.041,00	30,13	52.767.947.602,00	128,70
7	1.05.2.1.01.02	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	13.000.000.000,00	12.902.921.590,00	3.102.078.192,00	23,86	16.004.999.782,00	123,12
8	1.01.13.2.4.01.02	PAJAK KENDARAAN DI ATAS AIR	40.000.000,00	-	-	-	-	-
		BAGI HASIL BUKAN PAJAK						
1	1.03.2.1.02.01	PROVISI SUMBER DAYA HUTAN (PSDH)	229.899.500,00	38.392.998,00	40.276.809,00	17,52	78.669.807,00	34,22
2	1.03.2.1.02.03	IURAN TETAP (LANDRENT)	1.000.000,00	-	-	-	-	-
3	1.03.2.1.01.12	PERIKANAN	9.7446.800,00	241.688.091,00	-	-	241.688.091,00	25,24
4	1.03.2.1.02.08	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI	12.000.000.000,00	17.958.984.164,00	9.157.077.825,00	76,31	27.116.061.989,00	225,97
5	1.03.2.1.02.09	PERTAMBANGAN GAS ALAM	18.200.000.000,00	15.318.498.315,00	9.440.171.446,00	51,66	24.758.669.761,00	135,50
6	1.03.2.1.02.10	PERTAMBANGAN UMUM	1.665.368.000,00	-	982.616.870,00	58,97	982.616.870,00	58,97
		JUMLAH PENERIMAAN : E	185.549.214.300,00	125.647.244.359,90	61.632.838.496,76	33,58	187.280.082.856,66	102,03
	1.5	F DANA ALOKASI UMUM	351.714.000.000,00	351.714.000.000,00	-	-	351.714.000.000,00	100,00
		JUMLAH PENERIMAAN F	351.714.000.000,00	351.714.000.000,00	-	-	351.714.000.000,00	100,00

2	1.2	B. RETRIBUSI DAERAH	51.655.251.000,00	36.175.171.886,00	3.728.879.660,00	7,22	39.904.051.546,00	77,25	
3	1.3	C. LABA BADAN USAHA DAERAH	3.000.000.000,00	124.483.866,71	2.696.282.599,00	89,88	2.820.766.465,71	94,03	
4	1.4	D. PAD LAIN YANG SAH	7.102.740.965,00	5.097.913.874,50	414.671.420,00	5,84	5.512.585.294,50	77,61	
Jumlah A + B + C + D (PAD)			105.857.991.965,00	75.383.905.567,21	10.716.199.881,00	10,12	86.100.105.448,21	81,34	
5	2	E. BAGI HASIL PAJAK / BUKAN PAJAK	183.549.214.300,00	125.647.244.359,90	61.632.838.496,76	33,58	187.280.082.856,66	102,03	
6		F. DANA ALOKASI UMUM	351.714.000.000,00	351.714.000.000,00	-	-	351.714.000.000,00	100,00	
Jumlah Penerimaan (A + B + C + D + E + F)			641.121.206.265,00	552.745.149.927,11	72.349.038.377,76	11,28	625.094.188.304,87	97,50	

PALEMBANG, 18 JANUARI 2006

MENGETAHUI
WALIKOTA PALEMBANG



H. EDDY SANTANA PUTRA

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KOTA PALEMBANG



Drs. H. MARWAN HASMEN, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NTR. 440008655

TEMBUSAN : KEPADA YTH :

1. GUBERNUR PROPINSI SUMATERA SELATAN
2. KEPALA BADAN PENGAWAS PROPINSI SUMATERA SELATAN
3. ASISTEN I BIDANG PEMERINTAHAN SETDA SUMATERA SELATAN
4. KEPALA BIRO KEUANGAN SETDA SUMATERA SELATAN
5. KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN
6. KEPALA BIRO PEMERINTAHAN UMUM SUMATERA SELATAN
7. INSPEKTUR KOTA PALEMBANG
8. KEPALA BAGIAN KEUANGAN KOTA PALEMBANG
9. KETUA KOMISI B DPRD KOTA PALEMBANG
10. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG
11. KEPALA PERWAKILAN II BPK DI PALEMBANG

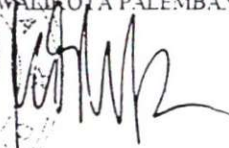
NO	KODE REKENING	JENIS PENERIMAAN	TARGET	REALISASI - PENERIMAAN		%	S/D BULAN INI	%	KET.
				S/D BULAN LALU	BULAN INI				
	1.1	A. PAJAK DAERAH							
1	1.01.05.1.1.01	PAJAK HOTEL	5.271.000.000,00	2.787.032.390,00	413.091.412,00	7,84	3.200.124.002,00	60,71	
2	1.01.05.1.1.02	PAJAK RESTORAN	6.794.220.400,00	5.536.195.619,00	612.577.473,00	9,02	6.148.773.092,00	90,50	
3	1.01.05.1.1.03	PAJAK HIBURAN	1.523.583.000,00	1.295.220.526,00	114.845.636,00	7,54	1.410.066.162,00	92,55	
4	1.01.05.1.1.04	PAJAK REKLAME	2.050.417.282,00	2.070.419.893,00	88.059.724,00	4,29	2.158.479.617,00	105,27	
5	1.01.05.1.1.05	PAJAK PENERANGAN JALAN	22.400.000.000,00	16.182.289.893,75	1.900.445.993,75	8,48	18.082.735.887,50	80,73	
6	1.01.05.1.1.06	PAJAK PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOL. C	299.786.000,00	337.235.092,00	35.792.720,00	11,94	373.027.812,00	124,43	
7	1.01.05.1.1.07	PAJAK PARKIR	1.000.000.000,00	448.472.460,00	81.521.300,00	8,15	529.993.760,00	53,00	
		JUMLAH PENERIMAAN : A	39.339.006.682,00	28.656.866.073,75	3.246.334.238,75	8,25	31.933.200.332,50	81,10	
	1.2	B. RETRIBUSI DAERAH							
1	1.01.11.1.2.33	RETRIBUSI PUNGUTAN ADMINISTRASI (LEGES)	136.600.000,00	84.638.000,00	9.246.000,00	6,77	93.884.000,00	68,73	
2	1.02.01.1.2.15	RETRIBUSI PELELANGAN IKAN	85.000.000,00	70.663.864,00	8.462.809,00	9,96	79.126.673,00	93,09	
3	1.02.01.1.2.20	RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN	185.000.000,00	130.128.000,00	33.715.500,00	18,22	163.843.500,00	88,56	
4	1.02.01.1.2.40	RETRIBUSI JASA USAHA KEHUTANAN	75.000.000,00	70.778.600,00	4.829.300,00	6,44	75.607.900,00	100,81	
5	1.02.01.1.2.41	RETRIBUSI PENG & PENGELOLAAN SARANG WALET	75.000.000,00	-	-	-	-	-	
6	1.06.01.1.2.30	RETRIBUSI TANDA DAFTAR PERUSAHAAN	75.000.000,00	80.527.000,00	6.231.300,00	8,31	86.758.300,00	115,68	
7	1.06.01.1.2.31	RETRIBUSI IZIN PERDAGANGAN	150.000.000,00	150.950.000,00	11.100.000,00	7,40	162.050.000,00	108,03	
8	1.06.01.1.2.32	RETRIBUSI USAHA INDUSTRI	12.500.000,00	5.625.000,00	2.775.000,00	22,20	8.400.000,00	67,20	
9	1.06.02.1.2.08	RETRIBUSI PELAYANAN PASAR	4.104.488.700,00	2.941.235.099,00	267.116.288,00	6,51	3.208.351.387,00	78,17	
10	1.06.02.1.2.14	RETRIBUSI PERPASARAN SWASTA	48.000.000,00	20.577.000,00	13.743.000,00	28,63	34.320.000,00	71,50	
11	1.08.01.1.2.28	RETRIBUSI IZIN GANGGUAN	1.400.000.000,00	2.185.975.610,00	99.936.530,00	7,14	2.285.912.140,00	163,28	
12	1.09.01.1.2.41	RET. PEMB. DAN PENG. NORMA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA	115.000.000,00	94.861.239,00	14.971.200,00	13,07	109.831.439,00	95,51	
13	1.09.01.1.2.42	RET. PEMB. PERUSAHAAN DAN KETENAGAKERJAAN	35.000.000,00	29.409.500,00	2.061.500,00	5,90	31.475.000,00	89,93	
14	1.10.01.1.2.38	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN	1.215.334.300,00	1.180.241.275,00	253.681.200,00	20,87	1.433.925.475,00	117,99	
15	1.10.02.1.2.01	RETRIBUSI KES. RSUD PALEMBANG BARI	600.000.000,00	797.626.276,00	40.661.250,00	6,78	838.289.526,00	139,71	
16	1.12.01.1.2.42.01	RETRIBUSI PPUT	10.000.000,00	8.650.000,00	621.000,00	6,25	9.275.000,00	92,75	
17	1.12.01.1.2.42.02	RETRIBUSI PANGKAS RAMBUT	12.500.000,00	10.690.000,00	1.171.000,00	9,40	11.865.000,00	94,92	
18	1.13.01.1.2.11	RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA	100.000.000,00	80.885.000,00	11.961.000,00	11,96	92.845.000,00	92,85	
19	1.13.01.1.2.26	RETRIBUSI MENDIFIKAN BANGUNAN	11.500.000.000,00	7.713.951.845,00	2.024.618.800,00	17,61	9.738.595.645,00	84,68	
20	1.13.01.1.2.36	RETRIBUSI PENGGUNAAN TANAH	60.000.000,00	-	-	-	-	-	
21	1.13.01.1.2.37	RETRIBUSI IZIN PENGGUNAAN BANGUNAN	150.000.000,00	178.540.975,00	324.220,00	0,22	178.865.195,00	119,24	
22	1.14.01.1.2.10	RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PBK	130.000.000,00	100.335.815,00	11.853.780,00	9,12	112.189.595,00	85,50	




	REKONING		TARGET	S/D BULAN LALU	BULAN INI	%	S/D BULAN INI	%	KET.
23	1.15.01.1.2.13	RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH	135.000.000,00	82.392.000,00	6.250.000,00	4,63	88.642.000,00	65,66	
24	1.15.01.1.2.31	RETRIBUSI IZIN JASA KONSTRUKSI	50.000.000,00	70.283.000,00	3.500.000,00	7,00	73.783.000,00	147,57	
25	1.15.01.1.2.34	RET. GALIAN PAM, TELKOM, GAS, LISTRIK, GOL. C	25.000.000,00	13.696.500,00	1.510.000,00	6,04	15.206.500,00	60,83	
26	1.16.01.1.2.07	RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM	3.150.000.000,00	1.965.995.500,00	266.727.700,00	8,47	2.232.723.200,00	70,88	
27	1.16.01.1.2.09	RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	2.250.000.000,00	1.912.251.140,00	220.639.040,00	9,81	2.132.890.180,00	94,80	
28	1.16.01.1.2.16	RETRIBUSI TERMINAL	1.250.000.000,00	1.264.616.125,00	125.531.000,00	10,04	1.390.147.125,00	111,21	
29	1.16.01.1.2.23	RETRIBUSI JASA ANGKUTAN PENYEBERANGAN	265.000.000,00	246.351.200,00	35.568.750,00	13,42	281.919.950,00	106,38	
30	1.16.01.1.2.29	RETRIBUSI IZIN TRAYEK	200.000.000,00	159.250.000,00	14.440.000,00	7,22	173.690.000,00	86,85	
31	1.16.01.1.2.39	RETRIBUSI PEMBINAAN PERHUBUNGAN UDARA DAN TELEKOMUNIKASI	50.000.000,00	4.970.000,00	985.000,00	1,97	5.955.000,00	11,91	
32	1.16.01.1.2.45	RETRIBUSI BECA	75.000.000,00	64.030.000,00	360.000,00	0,48	64.390.000,00	85,85	
33	1.16.02.1.2.40	RETRIBUSI PEMBINAAN PEMANFAATAN MEDIA INFORMASI DAN KOMUNIKASI	15.000.000,00	11.475.000,00	-	-	11.475.000,00	76,50	
34	1.17.01.1.2.02	RETRIBUSI PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN	1.403.325.000,00	883.640.000,00	116.368.000,00	8,29	1.000.008.000,00	71,26	
35	1.17.01.1.2.05	RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN	21.487.500,00	13.734.900,00	904.750,00	4,21	14.639.650,00	68,13	
36	1.17.01.1.2.06	RETRIBUSI PELAYANAN PENGUBURAN MAYAT	20.700.000,00	8.500.000,00	1.000.000,00	5,37	9.500.000,00	31,59	
37	1.17.01.1.2.19	RETRIBUSI PENYEDOTAN TINJA	75.000.000,00	66.453.000,00	8.581.500,00	11,44	75.034.500,00	100,05	
38	1.17.02.1.2.13	RETRIBUSI SEWA LABORATORIUM	15.000.000,00	15.418.825,00	173.000,00	1,15	15.591.825,00	103,95	
39	1.17.02.1.2.24	RETRIBUSI JASA USAHA PENGOLAHAN LIMBAH CAIR	760.000.000,00	579.509.422,00	65.462.329,00	8,61	644.971.751,00	84,86	
40	1.18.01.1.2.03	RETRIBUSI PENGGUNAAN BLAYA CETAK KTP	875.000.000,00	824.725.900,00	79.639.650,00	9,10	904.365.550,00	103,36	
41	1.18.01.1.2.04	RETRIBUSI PENGGUNAAN BLAYA CETAK AKTA	385.000.000,00	261.145.500,00	19.415.250,00	5,04	280.560.750,00	72,87	
42	1.18.01.1.2.38	RETRIBUSI USAHA KEPARIWISATAAN	175.000.000,00	148.214.550,00	29.009.020,00	16,58	177.223.570,00	101,27	
JUMLAH PENERIMAAN : B			31.478.935.500,00	24.532.942.660,00	3.815.185.666,00	12,12	28.348.128.326,00	90,05	
	1.3	C. BAGIAN LABA USAHA DAERAH							
1	1.03.1.3.02.01	BANK PEMBANGUNAN DAERAH	1.000.000.000,00	-	-	-	-	-	
JUMLAH PENERIMAAN : C			1.000.000.000,00	-	-	-	-	-	
	1.4	D. LAIN-LAIN PENDAPATAN							
1	1.01.03.1.4.01	HASIL PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH	141.283.500,00	330.737.500,00	900.000,00	2,64	331.637.500,00	234,73	
2	1.01.03.1.4.02	JASA GIRO	460.000.000,00	348.517.602,00	41.276.088,00	8,97	389.793.690,00	84,74	
3	1.01.03.1.4.05	PENERIMAAN BAGI DEPOSITO (BPDSS)	800.000.000,00	326.125.059,00	15.275.010,00	1,91	341.400.069,00	42,68	
4	1.01.03.1.4.06	PENERIMAAN GANTI RUGI ATAS KEKAYAAN DAERAH (TP/TGR)	37.000.000,00	47.889.857,00	3.146.500,00	8,50	51.036.357,00	137,94	
5	1.01.03.1.4.07	PENERIMAAN LAIN-LAIN	2.110.946.300,00	5.376.733.753,00	70.342.017,00	3,33	5.447.075.770,00	258,04	
JUMLAH PENERIMAAN : D			3.549.229.800,00	6.430.003.771,00	130.939.615,00	3,69	6.560.943.386,00	184,86	
JUMLAH PENERIMAAN RUTIN (A + B + C + D) / PAD			75.367.171.982,00	59.619.812.504,75	7.192.459.539,75	9,54	66.812.272.044,50	88,65	

NO	KODE REKENING	JENIS PENERIMAAN	TARGET	REALISASI - PENERIMAAN		%	S/D BULAN INI	%	RE...
				S/D BULAN LALU	BULAN INI				
	2	E. BAGI HASIL PAJAK/BUKAN PAJAK BAGI HASIL PAJAK :							
1	1.03.2.1.01.03	BAGI HASIL PAJAK PPH 21	22.629.346.000,00	23.123.285.199,00	-	-	23.123.285.199,00	102,18	
2	1.03.2.4.01.01	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	21.000.000.000,00	4.182.826.275,00	-	-	4.182.826.275,00	19,92	
3	1.03.2.4.01.03	BEA BALIK NAMA (BBNKB)	25.820.000.000,00	4.929.180.725,00	-	-	4.929.180.725,00	19,09	
4	1.03.2.4.01.05	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR	10.584.000.000,00	3.517.986.666,00	-	-	3.517.986.666,00	33,24	
5	1.03.2.4.01.06	PAJAK PENGAMBILAN AIR PERMUKAAN & ABT	720.000.000,00	408.863.425,00	1.042.985,00	0,14	409.906.410,00	56,93	
6	1.05.2.1.01.01	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN	30.411.697.800,00	24.286.586.533,00	11.367.605.543,00	37,38	35.654.192.076,00	117,24	
7	1.05.2.1.01.02	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	8.100.000.000,00	9.975.959.381,00	1.550.903.112,00	19,15	11.526.862.493,00	142,31	
		BAGI HASIL BUKAN PAJAK							
1	1.03.2.1.02.01	IURAN HASIL HUTAN (IHH)	220.899.500,00	11.903.359,00	197.135.924,00	85,75	209.039.283,00	90,93	
2	1.03.2.1.02.03	IURAN TETAP (LANDRENT)	150.000.000,00	-	-	-	-	-	
3	1.03.2.1.01.12	PERIKANAN	957.446.800,00	-	157.520.783,00	16,45	157.520.783,00	16,45	
4	1.03.2.1.02.08	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI	11.458.000.000,00	13.453.378.965,00	6.343.108.283,00	55,36	19.796.487.248,00	172,77	
5	1.03.2.1.02.09	PERTAMBANGAN GAS ALAM	18.272.000.000,00	11.106.794.404,00	5.720.402.444,00	31,31	16.827.196.848,00	92,09	
6	1.03.2.1.02.10	PERTAMBANGAN UMUM	1.666.368.000,00	2.019.278.660,00	-	-	2.019.278.660,00	121,18	
		JUMLAH PENERIMAAN : E	151.998.758.100,00	97.016.043.592,00	25.337.719.074,00	16,67	122.353.762.666,00	80,50	

			S/D BULAN LALU	BULAN INI	%	S/D BULAN INI	%	KET.
		REKAPITULASI						
1	1.1	A. PAJAK DAERAH	39.339.006.682,00	28.656.866.073,75	3.246.334.258,75	8,25	31.903.200.332,50	81,10
2	1.2	B. RETRIBUSI DAERAH	31.478.935.500,00	24.532.942.660,00	3.815.185.666,00	12,12	28.348.128.326,00	90,05
3	1.3	C. LABA BADAN USAHA MILIK DAERAH	1.000.000.000,00	-	-	-	-	-
4	1.4	D. LAIN-LAIN PENDAPATAN	3.549.229.800,00	6.430.003.771,00	130.939.615,00	3,69	6.560.943.386,00	184,86
		JUMLAH A + B + C + D (PAD)	75.367.171.982,00	59.619.812.504,75	7.192.459.539,75	9,54	66.812.272.044,50	88,65
5	2	E. BAGI HASIL PAJAK / BUKAN PAJAK	151.998.758.100,00	97.016.043.592,00	25.337.719.074,00	16,67	122.353.762.666,00	80,50
		JUMLAH PENERIMAAN (A + B + C + D + E)	227.365.930.082,00	156.635.856.096,75	32.530.178.613,75	14,31	189.166.034.710,50	83,20

MENGETAHUI
 WALIKOTA PALEMBANG

 H. EDDY SANTANA PUTRA

PALEMBANG, 24 JANUARI 2005

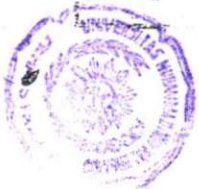
KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
 KOTA PALEMBANG

 Drs. H. MARWAN HASMEN, M.Si
 PEMBINA TK. I
 NIP. 440008655

TEMBUSAN : KEPADA YTH :

1. GUBERNUR PROPINSI SUMATERA SELATAN
2. KEPALA BADAN PENGAWAS PROPINSI SUMATERA SELATAN
3. ASISTEN I BIDANG PEMERINTAHAN SETDA SUMATERA SELATAN
4. KEPALA BIRO KEUANGAN SETDA SUMATERA SELATAN
5. KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN
6. KEPALA BIRO PEMERINTAHAN UMUM SUMATERA SELATAN
7. KEPALA BADAN PENGAWAS KOTA PALEMBANG
8. KEPALA BAGIAN KEUANGAN KOTA PALEMBANG
9. KETUA KOMISI C DPRD KOTA PALEMBANG
10. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG
11. KEPALA PERWAKILAN II BPK DI PALEMBANG

NO	KODE REKENING	JENIS PENERIMAAN	TARGET	REALISASI - PENERIMAAN		%	S/D BULAN INI	%	KET.
				S/D BULAN LALU	BULAN INI				
	1.1	A. PAJAK DAERAH							
1	1.01.05.1.1.01	PAJAK HOTEL	2.995.240.000,00	2.377.935.247,00	386.438.231,00	12,90	2.764.373.478,00	92,29	
2	1.01.05.1.1.02	PAJAK RESTORAN	4.733.100.500,00	4.556.921.341,00	455.573.783,00	9,63	5.012.495.124,00	105,90	
3	1.01.05.1.1.03	PAJAK HIBURAN	1.008.325.500,00	978.264.716,00	52.899.307,00	5,25	1.031.164.023,00	102,26	
4	1.01.05.1.1.04	PAJAK REKLAME	1.189.547.600,00	1.155.894.337,00	71.633.289,00	6,02	1.227.527.626,00	103,19	
5	1.01.05.1.1.05	PAJAK PENERANGAN JALAN	13.000.000.000,00	13.748.390.701,25	1.544.512.790,00	11,88	15.292.903.491,25	117,64	
6	1.01.05.1.1.06	PAJAK PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOL. C	228.015.000,00	218.204.428,00	12.446.940,00	5,46	230.651.368,00	101,16	
7	1.01.05.1.1.07	PAJAK PARKIR	472.844.000,00	395.018.636,00	82.020.330,00	17,35	477.038.966,00	100,89	
		JUMLAH PENERIMAAN : A	25.627.072.600,00	23.430.629.406,25	2.605.524.670,00	11,03	26.036.154.076,25	110,20	
	1.2	B. RETRIBUSI DAERAH							
1	1.01.11.1.2.33	RETRIBUSI PUNGUTAN ADMINISTRASI (LEGES)	151.100.000,00	107.399.000,00	8.148.000,00	5,39	115.547.000,00	76,47	
2	1.02.01.1.2.15	RETRIBUSI PELELANGAN IKAN	85.000.000,00	68.894.930,00	7.760.306,00	9,13	76.655.236,00	90,18	
3	1.02.01.1.2.20	RETRIBUSI RUMAH POTONG MEYAN	155.000.000,00	119.535.900,00	24.518.000,00	13,14	143.854.900,00	77,76	
4	1.02.01.1.2.35	RETRIBUSI JASA USAHA KEHUTANAN	75.000.000,00	73.310.075,00	2.446.100,00	3,26	75.756.175,00	101,01	
5	1.05.01.1.2.30	RETRIBUSI TANDA DAFTAR PERUSAHAAN	42.700.000,00	63.618.900,00	6.362.400,00	14,88	69.981.300,00	163,70	
6	1.05.01.1.2.31	RETRIBUSI IZIN PERDAGANGAN	110.000.000,00	133.550.000,00	10.200.000,00	9,27	143.750.000,00	130,68	
7	1.06.01.1.2.32	RETRIBUSI USAHA INDUSTRI	10.000.000,00	10.500.000,00	1.100.000,00	11,00	11.600.000,00	116,00	
8	1.06.02.1.2.38	RETRIBUSI PELAYANAN PASAR	2.740.616.800,00	2.371.126.242,00	375.047.690,00	13,68	2.746.173.932,00	100,20	
9	1.08.01.1.2.23	RETRIBUSI IZIN GANGGUAN	1.250.000.000,00	1.092.990.815,00	161.263.250,00	12,90	1.254.254.065,00	100,34	
10	1.09.01.1.2.34	RETRIBUSI PEMB. KETENAG. KERJAAN	25.000.000,00	21.027.500,00	1.350.000,00	5,40	22.377.500,00	89,51	
11	1.09.01.1.2.35	RET. PEMB. DAN PENG. NORMA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA	115.000.000,00	79.391.497,50	10.673.050,00	9,28	90.064.547,50	78,32	
12	1.10.01.1.2.21	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN	1.168.000.000,00	912.035.175,00	287.665.000,00	24,63	1.199.754.475,00	102,72	
13	1.12.02.1.2.43	RETRIBUSI PEL. KES. RSUD PALEMBANG BAJI	545.000.000,00	374.037.982,50	105.165.370,00	19,30	479.203.352,00	87,93	
14	1.13.01.1.2.11	RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PERUSAHAAN	100.000.000,00	72.315.000,00	4.950.000,00	4,95	77.265.000,00	77,47	
15	1.13.01.1.2.35	RETRIBUSI MENDIRIKAN BANGUNAN	2.500.000.000,00	8.601.199.230,00	964.348.200,00	10,15	9.565.547.430,00	100,69	
16	1.13.01.1.2.36	RETRIBUSI PENGGUNAAN TANAH	60.000.000,00	50.000.000,00	-	-	30.000.000,00	50,00	
17	1.13.01.1.2.37	RETRIBUSI PENGGUNAAN BANGUNAN	150.000.000,00	104.592.840,00	-	-	104.592.840,00	69,73	
18	1.14.01.1.2.10	RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PPK	110.000.000,00	84.011.547,50	9.779.475,00	8,89	93.791.022,50	85,26	
19	1.15.01.1.2.12	RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH	72.000.000,00	72.865.000,00	7.518.000,00	10,44	80.384.000,00	111,23	
20	1.15.01.1.2.42	RETRIBUSI IZIN JASA KONSTRUKSI	40.000.000,00	40.338.500,00	5.125.000,00	12,81	45.963.500,00	114,91	

NO	REKONING	JENIS PENERIMAAN	TARGET	REALISASI - PENERIMAAN		%	S/D BULAN INI	%	KET.
				S/D BULAN LALU	BULAN INI				
21	1.15.01.1.2.33	RETRIBUSI IZIN PENGUJIAN KUALITAS BANGUNAN	30.000.000,00	11.000.000,00	20.000.000,00	66,67	31.000.000,00	103,33	
22	1.16.01.1.2.07	RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM	2.752.000.000,00	2.115.567.350,00	219.489.000,00	7,98	2.335.056.350,00	84,85	
23	1.16.01.1.2.09	RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	2.000.000.000,00	1.818.901.940,00	208.630.060,00	10,43	2.027.532.000,00	101,38	
24	1.16.01.1.2.16	RETRIBUSI TERMINAL	1.200.000.000,00	1.004.643.900,00	168.632.550,00	14,05	1.173.276.450,00	97,77	
25	1.16.01.1.2.23	RETRIBUSI JASA ANGKUTAN PENYEBERANGAN	240.000.000,00	151.263.577,00	16.503.500,00	6,88	167.767.077,00	69,90	
26	1.16.01.1.2.29	RETRIBUSI IZIN TRAYEK	200.000.000,00	150.425.000,00	17.765.000,00	8,88	168.190.000,00	84,10	
27	1.16.01.1.2.41	RETRIBUSI PEMBINAAN PERHUBUNGAN UDARA DAN TELEKOMUNIKASI	50.000.000,00	8.205.000,00	-	-	8.205.000,00	16,41	
28	1.16.02.1.2.40	RETRIBUSI PEMBINAAN PEMANFAATAN MEDIA INFORMASI DAN KOMUNIKASI	15.000.000,00	11.575.000,00	525.000,00	3,50	12.100.000,00	80,67	
29	1.17.01.1.2.02	RETRIBUSI PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN	1.336.500.000,00	816.412.600,00	70.470.000,00	5,27	886.882.600,00	66,36	
30	1.17.01.1.2.05	RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN	21.487.500,00	12.828.700,00	1.222.250,00	5,69	14.050.950,00	65,39	
31	1.17.01.1.2.06	RETRIBUSI PELAYANAN PENGABUAN MAYAT	29.000.000,00	8.630.000,00	1.650.000,00	5,56	10.280.000,00	34,61	
32	1.17.01.1.2.19	RETRIBUSI PENYEDOTAN KAKUS	75.000.000,00	59.338.500,00	8.922.500,00	11,90	68.261.000,00	91,01	
33	1.17.02.1.2.24	RETRIBUSI JASA USAHA PENGOLAHAN LIMBAH CAIR	600.000.000,00	455.799.221,00	130.067.825,00	21,68	585.867.046,00	97,64	
34	1.18.01.1.2.03	RETRIBUSI PENGGUNAAN BIAYA CETAK KTP	825.000.000,00	933.560.850,00	80.779.250,00	9,79	1.014.340.100,00	122,95	
35	1.18.01.1.2.04	RETRIBUSI PENGGUNAAN BIAYA CETAK AKTA KEL	385.000.000,00	322.729.000,00	21.183.250,00	5,50	343.903.250,00	89,33	
36	1.18.01.1.2.38	RETRIBUSI USAHA KEPARIWISATAAN	175.000.000,00	122.551.250,00	23.053.500,00	13,17	145.614.750,00	83,21	
JUMLAH PENERIMAAN : 3			26.469.154.300,00	22.436.629.322,00	2.982.113.526,00	11,27	25.418.742.848,00	96,03	
1.3 C. BAGIAN LABA USAHA DAERAH									
1	1.03.1.3.02.01	BANK PEMBANGUNAN DAERAH	1.000.000.000,00	308.541.607,00	768.863.636,00	76,89	1.077.405.243,00	107,74	
JUMLAH PENERIMAAN : C			1.000.000.000,00	308.541.607,00	768.863.636,00	76,89	1.077.405.243,00	107,74	
1.4 D. LAIN-LAIN PENDAPATAN									
1	1.03.1.4.01.01	HASIL PENJUALAN BARANG MILI DAERAH	141.283.500,00	161.101.950,00	-	-	161.101.950,00	114,03	
2	1.03.1.4.02.01	JASA GIRO	460.000.000,00	99.196.839,40	21.491.045,00	4,7	120.687.884,40	26,24	
3	1.03.1.4.05.01	PENERIMAAN BAGI DEPOSITO (BROSS)	2.800.000.000,00	2.599.333.332,00	368.733.333,00	13,7	2.968.066.607,00	106,00	
4	1.03.1.4.07.01	PENERIMAAN CANTI RUKH ATAS KEKAYAAN DAERAH (TP/TGR)	37.000.000,00	65.019.200,00	10.444.200,00	28,39	76.463.400,00	206,66	
5	1.03.1.4.07.03	PENERIMAAN LAIN-LAIN	9.628.758.300,00	10.892.728.486,00	18.280.862,00	0,19	10.981.009.346,00	114,04	
6	1.01.03.3.1.01.01	KELEBIHAN PEMBAYARAN GAJI	300.000.000,00	236.212.910,00	75.972.682,00	25,31	312.185.592,00	104,06	
JUMLAH PENERIMAAN : D			10.367.041.800,00	14.054.592.917,40	64.922.122,00	0,62	14.619.514.839,40	109,37	
JUMLAH PENERIMAAN RUTIN (A + B + C + D) / PAJ			64.463.268.700,00	59.130.393.652,65	6.142.954.000,00	9,99	67.151.819.006,60	104,17	



				S/D BULAN LALU	BULAN INI	%	S/D BULAN INI	%	KET.
	2	E. BAGI HASIL PAJAK/BUKAN PAJAK BAGI HASIL PAJAK :							
1	1.03.2.1.01.03	BAGI HASIL PAJAK PPH 21	16.860.680.400,00	14.206.479.293,00	6.972.785.453,00	41,36	21.179.264.746,00	125,61	
2	1.03.24.01.01	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	13.000.000.000,00	6.325.444.333,00	-	-	6.325.444.333,00	48,66	
3	1.03.2.4.01.03	BEA BALIK NAMA (BBNKB)	16.000.000.000,00	6.767.346.867,00	-	-	6.767.346.867,00	42,30	
4	1.03.2.4.01.05	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR	8.000.000.000,00	2.358.971.378,00	-	-	2.358.971.378,00	29,49	
5	1.03.2.4.01.06	PAJAK PENGAMBILAN AIR PERMUKAAN & ABT	800.000.000,00	435.428.900,00	-	-	435.428.900,00	54,45	
6	1.05.2.1.01.01	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN	26.000.000.000,00	24.434.794.147,00	4.861.269.533,00	18,70	29.296.063.680,00	112,68	
7	1.05.2.1.01.02	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	7.600.000.000,00	7.365.825.133,00	1.498.723.036,00	21,41	8.864.543.169,00	126,64	
		BAGI HASIL BUKAN PAJAK							
1	1.03.2.1.02.01	IURAN HASIL HUTAN (IHH)	229.899.500,00	-	28.045.000,00	12,20	28.045.000,00	12,20	
2	1.03.2.1.02.03	IURAN TETAP (LANDRENT)	150.000.000,00	-	-	-	-	-	
3	1.03.2.1.02.05	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI	20.900.000.000,00	17.476.595.889,00	4.351.437.877,00	20,82	21.828.036.766,00	104,44	
4	1.03.2.1.02.09	PERTAMBANGAN GAS ALAM	4.637.000.000,00	-	1.047.645.313,00	22,59	1.047.645.313,00	22,59	
5	1.03.2.1.02.10	PERTAMBANGAN UMUM	1.665.368.000,00	1.441.950.720,00	695.694.683,00	41,75	2.137.645.403,00	128,28	
6	1.03.2.1.01.11	KEHUTANAN	-	252.631.575,00	737.234.312,00	-	989.865.987,00	-	
7	1.03.2.1.01.12	PERIKANAN	957.446.800,00	190.919.913,00	148.204.343,00	15,48	339.124.256,00	35,42	
		JUMLAH PENERIMAAN : E	116.201.394.700,00	81.258.391.248,00	20.341.039.350,00	17,50	101.597.430.798,00	87,43	

REKAPITULASI									
1	1.1	A. PAJAK DAERAH	23.627.072.600,00	23.430.629.406,25	2.605.524.670,00	11,03	26.036.154.076,25	110,20	
2	1.2	B. RETRIBUSI DAERAH	26.469.154.300,00	22.436.629.322,00	2.982.113.526,00	11,27	25.418.742.848,00	96,03	
3	1.3	C. LABA BADAN USAHA MILIK NEGARA	1.000.000.000,00	308.541.607,00	768.863.636,00	76,89	1.077.405.243,00	107,74	
4	1.4	D. LAIN-LAIN PENDAPATAN	13.367.041.800,00	14.054.592.717,40	564.922.122,00	4,23	14.619.514.839,40	109,37	
JUMLAH A + B + C + D (PAD)			64.463.268.700,00	60.230.393.052,65	6.921.423.954,00	10,74	67.151.817.006,65	104,17	
5	2	E. BAGI HASIL PAJAK / BUKAN PAJAK	116.201.394.700,00	81.256.391.248,00	20.341.039.550,00	17,50	101.597.430.798,00	87,43	
JUMLAH PENERIMAAN (A + B + C + D + E)			180.664.663.400,00	141.486.784.300,65	27.262.463.504,00	15,09	168.749.247.804,65	93,40	

PALEMBANG, 21 JANUARI 2004



TEMBUSAN : KEPADA YTH :

1. GUBERNUR PROPINSI SUMATERA SELATAN
2. KEPALA BADAN PENGAWAS PROPINSI SUMATERA SELATAN
3. ASISTEN I BIDANG PEMERINTAHAN SETDA SUMATERA SELATAN
4. KEPALA BIRO KEUANGAN SETDA SUMATERA SELATAN
5. KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN
6. KEPALA BIRO PEMERINTAHAN UMUM SUMATERA SELATAN
7. KEPALA BADAN PENGAWAS KOTA PALEMBANG
8. KEPALA BAGIAN KEUANGAN KOTA PALEMBANG
9. KEPUKA KOMISI C DPRD KOTA PALEMBANG
10. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG
11. KEPALA PERWAKILAN II BPK DI PALEMBANG



PEMERINTAH DAERAH KOTA PALEMBANG
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALEMBANG
Jalan Merdeka Nomor 1 Telepon 313301 / 312577
PALEMBANG

SURAT - KETERANGAN
NOMOR : 1275 /IX/2009

yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. M. HOYIN R, SE, MM
P : 196208021989021001
Kategori / Golongan : Pembina Utama Muda / IV. a
Jabatan : Kepala Bagian Keuangan Setda Kota Palembang

yang ini menerangkan bahwa :

Nama : INDAH FEBRIANI
M : 22 2005 048
Kategori Mahasiswa : Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang
Jurusan : Akuntansi

yang benar yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian dalam rangka
Kategori Penelitian Skripsi yang berjudul “ **Analisa Rasio Keuangan pada APBD
Pemerintah Kota Palembang dalam menilai kemandirian dan Efektifitas** “.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan
bagaimana mestinya.

Palembang, 11 Agustus 2009.

An. WALIKOTA PALEMBANG
SEKRETARIS DAERAH KOTA
Ub. KEPALA BAGIAN KEUANGAN,



H. M. HOYIN R, SE, MM
Pembina Utama Muda
Nip. 196208021989021001



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



064/J-10/FE-UMP/SHA/VIII/2009

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DIBERIKAN KEPADA :

NAMA : INDAH FEBRIANI
NIM : 222005048
JURUSAN : Akuntansi



Yang dinyatakan **LULUS** Membaca dan Hafalan Al - Qur'an
di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang
Dengan Predikat **MEMUASKAN**

Palembang, 06 Agustus 2009

an. Dekan
Pembantu Dekan IV



Dr. Antoni





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

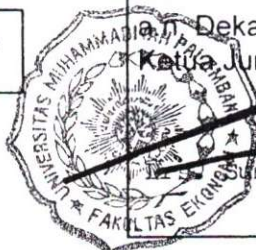
NAMA MAHASISWA : Indah Febriani	PEMBIMBING
NIRM/NIM : 22 2005 048	KETUA : Drs. Sunardi, SE., M.Si
JURUSAN : Akuntansi	ANGGOTA :
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS RASIO KEUNGAN APED PEMERINTAH KOTA PALEMBANG DALAM MENILAI KEMANDIRIAN DAN EFEKTIVITAS	

NO.	TGL/BL/TH KONSULTASI	MATERI YANG DIBAHAS	PARAF PEMBIMBING		KETERANGAN
			KETUA	ANGGOTA	
1	15-5-09	Seminar Up			
2	9-6-09	Bab I K. III			Pembahasan
3	16-6-09	Bab. I. II. III			Verbal
4	29-7-09	Bab II			Verbal
5	03-8-09	Bab IV			Partikel
6	06-8-09	Bab IV			Partikel
7		Bab IV			ke
8		Bab V			Partikel
9	9-8-09	Bab V			ke
10		Bab V			ke
11	12-8-09	Absorah dll			ke
12					Ujian korp.
13					
14					
15					
16					

CATATAN

Mahasiswa diberikan waktu menyelesaikan Skripsi, 6 bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan

Di keluarkan di : Palembang
Pada tanggal : / /



Dekan
Ketika Jurusan,

Sunardi, SE., M.Si

BIODATA PENULIS

Nama : Indah Febriani
Nim : 22.2005.048
Tempat/ Tanggal lahir : Palembang, 15 Februari 1987
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Jln. Jendral Bambang Utoyo Lrg. Sianjur 2 No.456
Rt/Rw : 04/01 Kelurahan 5 Ilir Kecamatan Ilir
Timur II Palembang 30115
No. Telpn : 085268176500/07117900770
E-Mail/fb : febriindah57@yahoo.co.id
Data Orang Tua
Nama
 Ayah : Syaukani
 Ibu : Rusmini
Pekerjaan
 Ayah : Pegawai Perpustakaan Provinsi
 Ibu : Guru
Alamat : Jln. Jendral Bambang Utoyo Lrg. Sianjur 2 No.456
Rt/Rw : 04/01 Kelurahan 5 Ilir Kecamatan Ilir
Timur II Palembang 30115

Palembang, Agustus2009
Penulis

Indah Febriani